

# LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan yang cukup mendasar pada tata pelaksanaan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan yang cukup signifikan pula pada paradigma perencanaan pembangunan. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah melakukan reorganisasi kelembagaan, penempatan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengembangan kapasitas anggota legislatif daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan selaras dengan pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah daerah yang bersangkutan, sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, adil, sejahtera, tenteram dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat dan harga diri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memiliki karakteristik terbuka (*open system*), yang diindikasikan dengan adanya kesalingketerkaitan (*reciprocity*) dalam bentuk jalinan kerja sama lintas wilayah. Konsekuensinya, perkembangan isu-isu nasional dan regional akan mempengaruhi kinerja pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan tersebut terangkum dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan beberapa pendekatan diantaranya adalah: teknokratis (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah); partisipatif (melibatkan semua pemangku kepentingan); politis (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih); dan *top down* dan *bottom up* (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa). Penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang perencanaan pembangunan daerah, melalui perumusan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Salah satu fungsi perencanaan pembangunan adalah melakukan antisipasi perkembangan ke depan, serta memberikan langkah-langkah alternatif yang harus diambil guna mencapai kondisi yang diharapkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan tersebut, sistem perencanaan pembangunan di samping harus mampu mendayagunakan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia secara optimal, juga adalah mengembangkan kebijakan-kebijakan yang inovatif dan mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal.

Pembangunan di Indonesia pada tahun 2012 ini dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan diikuti pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan bidang lainnya. Pembangunan ini selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kesinambungan lingkungan (*natural disaster*) dan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi

masyarakat. Berbagai upaya juga telah dilakukan dalam mengatasi isu-isu tersebut baik itu dengan merangkul sejumlah negara-negara dalam melaksanakan pembangunan mutualisme maupun dengan cara menggalakkan sistem pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*). Selain itu, respon yang harus segera dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi adanya isu-isu tersebut ialah bahwa proses perencanaan pembangunan hendaknya dilaksanakan dengan mengadopsi nilai-nilai partisipatif, guna memenuhi tuntutan masyarakat.

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; mengamanatkan bahwa Perencanaan pembangunan partisipatif diwujudkan secara berjenjang dalam hierarki rentang waktu, yakni: Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD (rentang waktu 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (rentang waktu 5 tahun) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD (rentang waktu 1 tahun).

Hierarki tersebut, sekaligus juga menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan pada rentang waktu yang lebih pendek, dapat mempedomani dokumen perencanaan pada rentang waktu yang lebih panjang. Penerapan prinsip mempedomani ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan sinergitas antar dokumen rencana pembangunan. Harapannya, kinerja pelaksanaan pembangunan ditahun mendatang akan memberikan hasil yang optimal, bagi percepatan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan isu-isu dimaksud terhadap kualitas hidup masyarakat Kota Pasuruan, sekaligus sebagai bentuk penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kota Pasuruan 2011–2015; maka perlu di susun dokumen review rencana pembangunan tahunan, dalam format Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan 2012.

Demi menjaga konsistensi rencana pembangunan antar waktu, penyusunan substansi materi dalam Review RKPD Kota Pasuruan 2012 dilaksanakan dengan mengacu pada agenda-agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 dan RPJM Nasional

tahun 2010–2014. Memperhatikan agenda pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, serta menimbang masalah serta tantangan yang dihadapi, prioritas pembangunan daerah Kota Pasuruan, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
3. Perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
5. Peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak;
6. Peningkatan peran pemuda dan keolahragaan;
7. Pemberdayaan usaha mikro, kecil & menengah serta peningkatan iklim investasi usaha;
8. Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur;
9. Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang;
10. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik;
11. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban, serta harmoni sosial;
12. Peningkatan kearifan lokal dan kesalehan sosial.

Dengan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kota Pasuruan bertekad untuk mewujudkan 12 prioritas tersebut secara optimal, melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Review RKPD 2012.

Melalui penetapan prioritas tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Pasuruan mampu memanfaatkan kedudukan dan peranannya untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan regional, sekaligus makin meningkatkan kesejahteraan warganya. Untuk itu sebagai pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan di daerah khususnya dalam mengelola pembangunan dan pemerintahan, perlu dirumuskan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta pagu indikatif belanja program dan kegiatan prioritas yang dituangkan dalam dokumen Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; serta
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; serta
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ, tanggal 12 Maret 2009 mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2010.

### **1.3 Definisi**

Review RKPD merupakan dokumen perubahan yang digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja (Renja). Review RKPD memuat tiga substansi pokok yaitu: (1) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RKED), (2) Prioritas Pembangunan Daerah dan (3) Pagu Indikatif. Masing-masing substansi tersebut memuat rincian dan proses penyusunan yang akan diuraikan dalam bahasan berikut. Proses penyusunan ketiga substansi pokok

tersebut mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009 - 2014, RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2011 dan RKP tahun 2011.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Review RKPD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Menimbang maksud yang terkandung dalam penulisannya, maka penyusunan Review RKPD memiliki tujuan sebagai:

- 1 Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Keuangan (KUA-PAK) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Keuangan (PPAS-PAK) APBD 2012;
- 2 Pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2012, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – PAK) SKPD tahun 2012.

#### **1.5 Proses Penyusunan**

Dalam uraian yang terkandung pada bagian penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; tersurat amanat yang, diantaranya, menyatakan bahwa proses penyusunan RKPD menggunakan lima pendekatan perencanaan (*planning approach*), yakni: teknokratik, partisipatif, *bottom-up*, *top-down*, dan politik. Penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang perencanaan pembangunan daerah, melalui penerapan prinsip aspiratif, transparan dan akuntabel.

Uraian pasal 17 – 24 yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008; menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses penyusunan RKPD. Secara ringkas, tahapan-tahapan dimaksud terbagi atas tiga kelompok utama, yakni: (1) penyusunan rancangan awal RKPD, (2) penajaman rancangan awal RKPD melalui: penjaringan aspirasi pemangkukepentingan (*stakeholders*); koordinasi antar instansi vertikal maupun horizontal dan sinkronisasi antara dokumen RKPD dengan dokumen-

dokumen lainnya, (3) penetapan rancangan akhir RKPD. Kelima pendekatan perencanaan di atas, akan dikombinasikan sedemikian rupa dalam setiap tahapan proses penyusunan RKPD ini.

Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan perencanaan pembangunan antar tingkatan pemerintah (*top-down planning*); sehingga pencapaian tujuan (*goals*) pembangunan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan prioritas-prioritas pembangunan dalam rancangan awal RKPD Kota Pasuruan tahun 2012, dilaksanakan dengan mengacu pada agenda pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Selanjutnya, prioritas pembangunan tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan usulan kegiatan, baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun SKPD.

Apabila pendekatan *top-down planning* berfungsi untuk menjamin integrasi perencanaan pembangunan, maka pendekatan partisipatif dan *bottom-up planning* berfungsi untuk menjamin teraktualisasinya sumber daya lokal (*local resources*) dan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu upaya-upaya pencapaian prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2011, akan dipertajam melalui penjangkauan aspirasi masyarakat secara berjenjang, dalam format musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai kota.

Penyelenggaraan musrenbang bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD, melalui penjangkauan aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, hasil musrenbang kecamatan tersebut akan disinergikan dengan rencana kerja SKPD dalam forum SKPD. Akhirnya, hasil dari forum SKPD akan dibahas secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh SKPD dan pemangkukepentingan pembangunan Kota Pasuruan, dalam musrenbang tingkat kota. Berbagai masukan yang diperoleh



dari pelaksanaan musrenbang kota, akan digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki substansi materi dalam rancangan awal RKPD.

Dalam rangkaian perbaikan substansi dimaksud, pendekatan teknokratik digunakan utamanya pada penyusunan materi yang berkenaan dengan rancangan kerangka ekonomi daerah. Metode dan kerangka berfikir ilmiah digunakan dalam menganalisis dan memproyeksikan indikator-indikator makro ekonomi daerah, termasuk diantaranya adalah penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Sementara pendekatan politik digunakan ketika proses penyempurnaan materi perlu mengakomodir rumusan pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan melibatkan secara aktif anggota legislatif dalam proses perencanaan.

## **1.6 Sistematika Penyusunan**

Hasil kombinasi lima (5) pendekatan perencanaan di atas, dalam proses penyusunan rancangan Review RKPD Kota Pasuruan 2012, akan tersaji dalam tata urutan penulisan sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan
  - 1.1.    Latar Belakang
  - 1.2.    Landasan Hukum
  - 1.3.    Definisi
  - 1.4.    Maksud dan Tujuan
  - 1.5.    Sistematika Penyusunan Review RKPD
- Bab II     Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2010
  - 2.1.    Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah
  - 2.2.    Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2011
  - 2.3.    Isu Strategis dan Masalah Mendesak
- Bab III    Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan
  - 3.1.    Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012

- 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012
- 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  - 3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
  - 3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
  - 3.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Bab IV Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012

- 4.1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
- 4.2. Memperluas Lapangan Kerja, Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
- 4.3. Meningkatkan Percepatan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan, Terutama Melalui Penguatan Ekonomi Rakyat
- 4.4. Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Publik
- 4.5. Meningkatkan Ketersediaan dan Optimasi Fungsi Infrastruktur, Kualitas Pengelolaan Fungsi Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
- 4.6. Meningkatkan Kualitas Harmonisasi Sosial, Kehidupan Politik dan Kebangsaan, serta Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat
- 4.7. Rencana Kinerja Indikator Makro Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab VI Kaidah Pelaksanaan

Bab VII Penutup

## BAB II

### EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

#### 2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan, akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran, yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksanaan pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama, yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

Secara terperinci, Tabel 2.1. menjelaskan perkembangan indikator makro pembangunan daerah Kota Pasuruan tahun 2009 – 2010; yang disusun sebagai hasil dari evaluasi kinerja terhadap indikator-indikator keberhasilan yang telah disepakati sebelumnya.

Pada bagian ini akan diuraikan perkembangan setiap indikator, perbandingan dengan target tahunan, serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator. Perkembangan indikator makro pembangunan Kota Pasuruan tahun 2009-2010, disajikan sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1., mencakup:

**Tabel 2.1.**

Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Pasuruan  
Tahun 2009 – 2010

No	Indikator	Satuan	2009	2010		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7 = 6 : 5
	<b>Kependudukan</b>					
1	Jumlah penduduk	Jiwa	176.028	-	186.262	-

2	Pertumbuhan penduduk	%	1,81	-	5,4	-
3	Kepadatan penduduk	Jiwa/km <sup>2</sup>	4.812	-	5.092	-
4	Jumlah penduduk miskin	Orang	35.150	-	36.984	-
5	Jumlah PMKS		1.322		5.719	
	Rasio PMKS tertangani dengan jumlah PMS	%	5,15	-	4,67	
	Rasio Jumlah Unit Rumah yang Dibantu Perbaikannya dengan Jumlah Rumah Tak Layak Huni	%	8,33	-	5,55	
	<b>Pendidikan</b>					
6	Angka partisipasi murni (APM)					
	- SD	%	111,67	-	112,64	-
	- SLTP	%	68,74	-	67,53	-
	- SLTA	%	62,33	-	61,51	-
7	Angka partisipasi kasar (APK)					
	- SD	%	125,93	-	125,95	-
	- SLTP	%	97,81	-	97,86	-
	- SLTA	%	98,00	-	98,09	-
8	Rasio Murid/Guru					
	- SD	Nisbah	17	-	16	-
	- SLTP	Nisbah	14	-	13	-
	- SLTA	Nisbah	13	-	13	-
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah					
	- SD	Nisbah	256,50	-	258	-
	- SLTP	Nisbah	352,50	-	356	-
	- SLTA	Nisbah	479	-	492	-
11	Angka Partisipasi Sekolah					
	- SD	%	111,23	-	80,61	-
	- SLTP	%	70,07	-	85,90	-
	- SLTA	%	62,33	-	64,20	-
	<b>Kesehatan</b>					
12	Angka harapan hidup	Tahun	66.41	-	68.23	-
13	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Bayi	12.72	-	6.99	-
14	Angka kematian ibu per 1.000 ibu melahirkan	Ibu	0.55	-	0.84	-
15	Prosentase KEP (kekurangan Energi Protein) pada Balita	%	15.43	-	10.73	-
	<b>Ekonomi</b>					
29	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.03	-	5,25	-
30	PDRB					
	- Atas dasar harga berlaku	Rp milyar	2.342	-	2.645	-
	- Atas dasar harga konstan	Rp milyar	1.057	-	1.006	-
31	Pendapatan per kapita	Rp/jiwa/th	13.613.836	-	15.100.000	-

Data dirangkum dari berbagai sumber

## 1. Indikator Sosial Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Pasuruan mengalami penambahan dari 176.028 jiwa pada tahun 2009 menjadi 186.262 jiwa pada tahun 2010. Atau dengan kata lain, jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 5,4% sepanjang 2009-2010. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk sepanjang 2008-2009 yang tercatat sebesar 1,81%.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Pasuruan mencapai 4.812 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 5.092 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2010. Di antara ketiga kecamatan yang berada di Kota Pasuruan, wilayah Kecamatan Purworejo mempunyai luas paling kecil (8,39 km<sup>2</sup>), namun memiliki jumlah penduduk paling besar dengan tingkat kepadatan sebesar 7.994 jiwa/ km<sup>2</sup>. Sebaliknya, Kecamatan Bugul Kidul dengan luas wilayah paling besar (17,66 km<sup>2</sup>) memiliki jumlah penduduk paling kecil dengan tingkat kepadatan sebesar 3.240 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan tercatat sebanyak 35.150 orang, dan mengalami peningkatan menjadi 36.984 orang pada tahun 2010. Perlu disadari bahwa data kemiskinan dalam dua tahun tersebut, diperoleh dari dua sumber yang berbeda; dengan kriteria perhitungan yang berbeda pula. Konsekuensinya, kedua data ini tidak bisa diperbandingkan. Namun demikian, mengingat keterbatasan data yang tersedia, maka data tersebut tetap ditampilkan untuk memberikan gambaran kasar mengenai kondisi kemiskinan di Kota Pasuruan.

Sementara itu, angka rasio PMKS tertangani dengan jumlah PMS dan angka rasio jumlah unit rumah yang dibantu perbaikannya dengan jumlah rumah tak layak huni pada tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hal positif yang menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kota Pasuruan dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.

## 2. Indikator Pendidikan

Secara umum, indikator kinerja pendidikan Kota Pasuruan menunjukkan kecenderungan yang positif. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan data

kinerja pendidikan tahun 2009-2010, sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 di atas. Capaian kinerja tersebut ditunjukkan, antara lain, oleh indikator angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), rasio murid/guru, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, angka partisipasi sekolah.

Capaian kinerja ini bukan berarti tanpa kendala, mengingat sebagian kinerja pendidikan lainnya menunjukkan kinerja yang bertentangan. Rasio murid/guru pada jenjang pendidikan SD dan SLTP mengalami penurunan, secara berurutan yaitu dari angka 17 dan 14 pada tahun 2009 menjadi 16 dan 13 pada tahun 2010. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SLTA tahun 2009-2010, tidak mengalami penurunan maupun peningkatan atau dengan kata lain tetap sebesar 13. Penurunan dan angka yang tetap ini menunjukkan bahwa satu ruang kelas ditempati oleh lebih banyak murid, yang berpotensi mengurangi kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar di kelas.

Ditinjau dari angka partisipasi sekolah, dari tahun 2009-2010 cenderung mengalami penurunan baik itu dari jenjang SD, SLTP maupun SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah dasar di Kota Pasuruan tidak hanya menerima anak usia SD yang berasal dari Kota Pasuruan, tetapi juga dari luar Kota Pasuruan, yaitu Kabupaten Pasuruan.

### 3. Indikator Kesehatan

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan dalam rentang waktu 2009-2010, secara garis besar, menunjukkan kinerja pembangunan yang relatif baik. Hal ini diindikasikan dengan membaiknya sebagian capaian indikator kinerja pembangunan kesehatan, antara lain: angka harapan hidup, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dan presentase KEP (kekurangan energi protein) pada balita.

Namun demikian, sebagian indikator sebagian indikator kinerja lainnya menunjukkan hasil yang kontradiktif dengan target perencanaan yang telah disusun, yakni: angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup yang mengalami peningkatan dari 0,55 pada tahun 2009 menjadi 0,84 pada tahun 2010.

Meningkatnya angka kematian ibu ini selayaknya menjadi perhatian khusus bagi pembangunan kesehatan ibu yang melahirkan di Kota Pasuruan, mengingat angka kematian anak sudah jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Selain kelahiran bayi, keselamatan ibu juga perlu untuk diperhatikan sehingga angka kematian ibu dapat ditekan.

#### 4. Indikator Ekonomi

Perkembangan kondisi ekonomi internasional dan nasional turut berdampak terhadap kinerja perekonomian Kota Pasuruan. Dalam situasi perekonomian dunia yang belum sepenuhnya pulih, Kota Pasuruan mencatat kinerja perekonomian yang relatif baik. Hal ini bisa dilihat dari nilai PDRB, baik ADHB maupun ADHK, yang mengalami peningkatan pada tahun 2009 dan 2010.

PDRB ADHB mengalami peningkatan dari Rp.2.342,- milyar pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp.2.645,- pada tahun 2010. Sementara itu, PDRB ADHK mengalami penurunan dari Rp.1.057,- milyar pada tahun 2009 menurun menjadi Rp.1.006,- pada tahun 2010. Kenaikan nilai PDRB ini juga diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita dari kisaran 13 juta per orang per tahun pada tahun 2009 menjadi kisaran 15 juta orang per tahun pada tahun 2010.

Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan tahun 2010 (5,25%) tercatat lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2009 (5,03%). Menilik kondisi perekonomian dunia dan nasional, yang belum mampu sepenuhnya beranjak dari terpaan krisis ekonomi dalam kurun waktu lima tahun terakhir; maka penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2009 dan 2010 merupakan hal yang dapat dimaklumi. Tindakan antisipatif yang perlu dilakukan adalah bagaimana meminimalisir dampak krisis ekonomi terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat, yang berpotensi menyeret mereka untuk hidup di bawah garis kemiskinan.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2010**

Pada bagian ini akan diuraikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010 yang tidak memenuhi target kinerja, sekaligus menjelaskan permasalahan yang menjadi penyebabnya. Hasil yang diperoleh dari evaluasi ini diharapkan mampu menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada tahun 2012, guna memecahkan permasalahan yang terjadi sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya masalah yang sama pada waktu yang akan datang.

Secara umum penyebab terhambatnya pelaksanaan kegiatan adalah yakni: kenaikan harga BBM akibat dari kelangkaan BBM yang bersumber dari pengurangan BBM subsidi untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, menyebabkan kenaikan harga barang secara umum. Akibatnya, standar harga dalam rencana anggaran biaya (RAB) tidak lagi sesuai dengan harga pasar. Oleh karena itu diperlukan revisi untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga barang di pasaran. Disamping itu ketidaksinkronan antara waktu ketersediaan anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan, juga merupakan faktor yang berpotensi menimbulkan permasalahan.

Sebagai upaya untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali, maka dilakukan perbaikan perencanaan, terutama untuk kegiatan yang pelaksanaan dan pendanaannya membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Perbaikan perencanaan difokuskan pada perencanaan waktu, yang mengakomodir kebutuhan waktu penyelesaian untuk setiap tahapan pelaksanaan kegiatan dalam format *time schedule*.

### **2.3 Isu Strategis dan Masalah Mendesak**

Multi krisis yang terjadi telah meningkatkan jumlah pengangguran, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan menurunnya kinerja ekonomi; yang berpotensi memunculkan terjadinya konflik sosial. Untuk menangani dan meminimalisir dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari multi krisis yang terjadi, diperlukan kerja keras dan niat tulus dari semua pihak agar mampu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segala kepentingan yang ada. Hal ini sangat penting, terutama untuk menyembuhkan rasa kepercayaan pada masyarakat terhadap peran dan fungsi aparat pemerintah.



Berdasarkan analisa terhadap perkembangan kondisi pembangunan mutakhir, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012, terdapat beberapa isu strategis yang akan mewarnai pelaksanaan pembangunan Kota Pasuruan ke depan, sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan penduduk dan kualitas layanan pendidikan, bagi sebagian kelompok masyarakat yang termarginalkan;;
2. Kualitas pelayanan kesehatan dan kuantitas tenaga kesehatan;
3. Perluasan lapangan pekerjaan dan usaha penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan antar pemerintah pusat, provinsi dan kota;
5. Peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak;
6. Belum meratanya dukungan infrastruktur terutama di bidang keolahragaan dan kualitas pemuda sebaga ujung tombak dalam pergerakan pembangunan daerah;
7. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta peningkatan iklim investasi usaha.

Dalam perkembangannya, dengan mempertimbangkan kondisi tertentu, isu-isu strategis di atas akan berubah menjadi permasalahan mendesak yang menuntut langkah antisipasi guna meminimalisir dampak buruknya bagi upaya-upaya percepatan pencapaian hasil-hasil pembangunan. Demi efektifitas perumusan pencegahannya, maka identifikasi terhadap masalah mendesak akan dipetakan dalam tahap input, output dan proses.

Pemetaan masalah-masalah ini, bertujuan untuk memudahkan pengambil-keputusan dalam rangka memilih alternatif pemecahan yang paling efektif.

Permasalahan pada tahap input menunjukkan kondisi subyek yang akan dikenai perlakuan (treatment) dalam tahapan proses. Adapun tahap proses, menunjukkan bagaimana perlakuan diberikan untuk memperbaiki kondisi input. Selanjutnya, output menunjukkan hasil yang diperoleh setelah perlakuan diberikan kepada input.

Sebagaimana disinggung pada bagian atas, bahwa tantangan pokok yang potensial akan dihadapi dalam pembangunan Kota Pasuruan tahun 2012 dalam beberapa poin. Tantangan-tantangan tersebut akan dikelompokkan menurut urusan pemerintahan yang relevan, untuk selanjutnya akan disusun pemetaan permasalahan yang lebih detail berdasarkan tahapan input, proses dan output sebagai berikut:

## 1. Pendidikan

- a. **Permasalahan input:** Masih rendahnya angka kecukupan gizi anak serta angka partisipasi sekolah, kesenjangan partisipasi pendidikan relatif masih lebar.
- b. **Permasalahan proses:** Kurangnya upaya penanganan/pencegahan putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yang didukung oleh peningkatan kualitas guru, pemenuhan operasional (gedung, mebelair, laboratorium, biaya operasional, buku/perpustakaan, manajerial), manajemen pendidikan belum efektif dan efisien.
- c. **Permasalahan output:** Kurangnya daya saing lulusan, dan berujung pada rendahnya angka penyaluran pasca kelulusan; terutama untuk pendidikan praksis.

## 2. Kesehatan

- a. **Permasalahan input:** Kurangnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan lingkungan hidup sehat; rendahnya kualitas kesehatan masyarakat dan penyebaran informasi penting dan penyuluhan kesehatan.
- b. **Permasalahan proses:** Masih lemahnya ketanggapan dalam merespon keluhan pasien, perkembangan penyakit gawat (DB dan TBC), pemantauan gizi buruk dan kerawanan penyakit, pemantauan obat (kimia, tradisional) dan makanan; terbatasnya tenaga kesehatan; serta tuntutan terhadap pelayanan pasien, belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan.
- c. **Permasalahan output:** Masih rendahnya kinerja indikator kesehatan, diantaranya adalah angka kematian ibu maternal dan status gizi balita.

### 3. Kemiskinan

- a. **Permasalahan input:** Lemahnya akurasi data kemiskinan dan perbedaan data kemiskinan antar lembaga, terutama untuk antisipasi sasaran program yang bertujuan untuk pengurangan beban (*rescue*) dan pemberdayaan (*recovery*) kelompok masyarakat miskin.
- b. **Permasalahan proses:** Kurang efektifnya pemberdayaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan, peningkatan kemandirian dalam upaya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin dan antisipasi perlambatan ekonomi global.
- c. **Permasalahan output:** Inefektifitas evaluasi hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

### 4. Ketenagakerjaan

- a. **Permasalahan input:** Tingginya laju pertumbuhan penduduk usia produktif, dan kurangnya profesionalisme lembaga pelatihan ketenagakerjaan.
- b. **Permasalahan proses:** Lambatnya penciptaan wirausaha baru yang tidak didukung oleh peningkatan kapasitas wirausaha; penguatan permodalan dan pemasaran; penciptaan iklim investasi yang kondusif; peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, pelaksanaan proyek padat karya.
- c. **Permasalahan output:** Rendahnya kompetensi tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi pasar tenaga kerja; serta melemahnya angka serapan tenaga kerja.

### 5. Pertanian

- a. **Permasalahan input:** Lemahnya inventarisasi fungsi lahan pertanian, penyediaan tenaga muda di bidang pertanian perkebunan, perikanan, peternakan dan kelautan, serta kurangnya optimalisasi fungsi kelompok pertanian.
- b. **Permasalahan proses:** Kurangnya penerapan teknologi peningkatan produktivitas, perbaikan mutu benih dan lahan, intensifikasi lahan pekarangan, sarana prasarana pendukung bidang pertanian dan kelautan; serta tingginya konversi lahan pertanian.

- c. **Permasalahan output:** Lemahnya pengembangan jaringan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kelautan guna meningkatkan harga jual yang wajar bagi petani dan nelayan.

## 6. **Industri, perdagangan, koperasi dan UKM**

### **Industri:**

- a. **Permasalahan input:** Kurangnya kreativitas pengrajin dalam melakukan diversifikasi produk industri kerajinan karena tidak ditunjang dengan ketersediaan tenaga terampil dan akses permodalan IKM, maupun kontinuitas perolehan bahan baku.
- b. **Permasalahan proses:** Rendahnya upaya-upaya pengrajin untuk melakukan peningkatan efisiensi produksi; inovasi desain baru, diversifikasi produk dan pengelolaan sentra kerajinan berkelanjutan.
- c. **Permasalahan output:** Rendahnya kesesuaian hasil produksi dengan standar minimal yang diminta pasar; kurangnya nilai tambah produk; lemahnya penguasaan pasar.

## 7. **Perdagangan:**

- a. **Permasalahan input:** Rendahnya modal usaha, kualitas barang pedagang kecil dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pasar yang layak.
- b. **Permasalahan proses:** Meningkatnya intensitas persaingan tidak seimbang antara pedagang pasar tradisional (toko pracangan dan pedagang pasar) dengan pasar modern (jaringan ritel berkonsep waralaba).
- c. **Permasalahan output:** Menjamurnya toko-toko waralaba di sekitar pemukiman penduduk yang lokasinya berdekatan dengan pedagang kecil, menurunnya omzet dan aset pedagang kecil akibat kalah bersaing dengan pasar modern dan berpotensi menurunkan kinerja sektor perdagangan yang berbasis ekonomi rakyat.

## 8. **Koperasi dan UKM:**

- a. **Permasalahan input:** Kurangnya akses permodalan dan lemahnya kemampuan mengelola usaha bagi koperasi dan UMKM.

- b. **Permasalahan proses:** peningkatan manajemen dan organisasi koperasi; teknik dan metode pengembangan jiwa kewirausahaan; pengembangan networking.
- c. **Permasalahan output:** Menurunnya kinerja peningkatan kesejahteraan anggota.

#### 9. **Infrastruktur, penataan ruang dan permukiman**

- a. **Permasalahan input:** Kurangnya sinergitas dukungan infrastruktur terutama untuk pencapaian prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan; pengendalian dan pemanfaatan ruang berbasis pengurangan resiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana perumahan/permukiman.
- b. **Permasalahan proses:** penanganan desain dan teknis infrastruktur infrastruktur perumahan seperti infrastruktur jalan lingkungan, jaringan drainase, jaringan limbah, listrik, telekomunikasi, fasos dan fasum; infrastruktur permukiman, sekolah, kesehatan, perhubungan termasuk peningkatan manajemen lalu lintas, perdagangan dan investasi yang dikondisikan kepada bangunan yang tanggap bencana.
- c. **Permasalahan output:** infrastruktur yang penunjang perumahan/permukiman, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perhubungan lebih memadai.

#### 10. **Pemuda dan Olahraga**

- a. **Permasalahan input:** Rendahnya kualitas pemuda, minimnya peran dan partisipasi para pemuda dalam pembangunan, rendahnya partisipasi dan aktivitas masyarakat di bidang olahraga
- b. **Permasalahan proses:** Penyediaan fasilitas umum untuk lapangan dan fasilitas olahraga yang minim, penyelenggaraan kegiatan karang taruna atau organisasi khusus pengembangan kemampuan dan kreatifitas pemuda yang kurang optimal baik dari segi sarana dan prasarana maupun manajerial.
- c. **Permasalahan output:** Kurangnya daya saing atlet di bidang olahraga akibat kurangnya daya dukung terhadap material maupun

immaterial; kurangnya produktivitas pemuda dalam menggeluti bidang usaha sebagai hasil dari pembinaan dan karang taruna.

## **11. Lingkungan hidup**

- a. **Permasalahan input:** Meningkatnya angka kerusakan lingkungan hidup, terutama pada areal produktif; serta menurunnya pemulihan kualitas daerah lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau (RTH).
- b. **Permasalahan proses:** Lemahnya upaya-upaya penguatan kapasitas, pengurangan kerentanan dalam pengelolaan lingkungan; serta kurangnya kerjasama dan koordinasi dalam penanganan lingkungan;
- c. **Permasalahan output:** Menurunnya daya dukung lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan.

## **12. Pemerintahan Umum**

- a. **Permasalahan input:** Kurangnya kompetensi aparatur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan dan pembangunan.
- b. **Permasalahan proses:** Lambatnya pengembangan dan aplikasi standar operating procedure (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM); yang berujung pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
- c. **Permasalahan output:** Pelambatan percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

### BAB III

## RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

### 3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Periode 2009-2010 dan Perkiraan Tahun 2011

Kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis menghadapkan perekonomian Indonesia pada sejumlah tantangan yang tidak ringan selama tahun 2009. Tantangan itu cukup mengemuka pada awal tahun 2009, sebagai akibat masih kuatnya dampak krisis perekonomian global yang mencapai puncaknya pada triwulan IV 2008. Ketidakpastian yang terkait dengan sampai seberapa dalam kontraksi global dan sampai seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, bukan saja menyebabkan tingginya risiko di sektor ekonomi, tetapi juga berdampak negatif pada seluruh sektor pembangunan di Indonesia.

Namun menginjak kuartal pertama pada tahun 2010 kondisi perekonomian ini sudah berada pada fase pemulihan dan mulai dapat teratasi. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional, dari 4,5% pada tahun 2009 menjadi 6,1% pada tahun 2010. Kondisi perekonomian nasional tersebut membawa dampak positif terhadap kondisi perekonomian regional, termasuk Kota Pasuruan.

Kondisi perekonomian di Kota Pasuruan mencatat kinerja yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan tercatat sebesar 5,03% pada tahun 2009, dan mengalami kenaikan menjadi 5,25% pada tahun 2010. Secara umum, indikator perekonomian Kota Pasuruan menunjukkan capaian kinerja yang relatif prospektif; sebagaimana terlihat dari data-data yang tercantum dalam tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Pasuruan  
Tahun 2008– 2010 dan Perkiraan Tahun 2011–2012

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi			Proyeksi	
			2008	2009	2010	2011	2012
1	PDRB						
	- ADHB	Rp milyar	2.108	2.342	2.604	2.715	2986

	- ADHK	Rp milyar	1.006	1.057	1.115	1.148	1.241
2	Pertumbuhan ekonomi	%	5,47	5,03	5,25	5,73	5,82
3	Tingkat inflasi	%	9,46	5,81	9,54	8,98	5,71
4	Struktur ekonomi (ADHK)						
	- Sektor perdagangan	%	35,45	35,1	36,62	36,86	38,38
	- Sektor industri	%	17,33	16,84	17,48	17,65	18,29
	- Sektor angk. & komunikasi	%	13,08	13,69	13,1	13,34	13,95
5	Pendapatan per kapita	Rp/org/thn	12.416.017	13.613.836	14.217.547	14.957.217	15.925.415
6	Rasio PAD/PDRB ADHB	%	1,29	1,38	1,42	1,47	1,56
7	Jumlah penduduk miskin	Orang	27.274	36.352	44.457	47.233	37.315
8	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	63,15	64,17	65,07	65,49	66,17
9	Tingkat pengangguran terbuka (TKK)	%	10,72	10,38	10,16	9,98	9,66

Sumber: Bappeda Kota Pasuruan

Nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi Kota Pasuruan tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2009 mencapai angka Rp.2.342.573.669.000,- dan mengalami peningkatan menjadi Rp.2.645.542.000.000,- pada tahun 2010. Namun peningkatan tersebut masih bersifat semu, karena faktor kenaikan harga akibat inflasi masih terkandung di dalamnya. Untuk itu dilakukan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang telah menghilangkan faktor inflasi. Pada tahun 2009 PDRB ADHK Kota Pasuruan mencapai angka Rp.1.057.446.457.000,- dan meningkat menjadi Rp.1.117.313.000.000,- pada tahun 2010.

Data pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Pasuruan bertipe sekunder-tercier, yang didominasi oleh sektor-sektor pengolahan, perdagangan dan jasa. Pada tahun 2009, kontribusi PDRB didominasi oleh sektor perdagangan (35,55%), sektor industri pengolahan (17,56%) serta sektor angkutan dan komunikasi (12,57%). Struktur ekonomi sekunder-tercier memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah, sebab



aktivitas-aktivitas ekonomi tidak dilakukan dengan mengambil langsung dari alam dan menjualnya dalam bentuk bahan mentah.

Sebagai salah satu lokomotif perekonomian daerah, kinerja sektor perdagangan juga menunjukkan kinerja positif. Guna mempertahankan kinerja tersebut, Pemerintah Kota terus berupaya memperbaiki ketersediaan sarana dan prasarana pasar. Sampai dengan tahun 2010, terdapat 4 pasar yang tersebar pada berbagai kecamatan di Kota Pasuruan, yang terdiri atas: 47 ruko, 2.317 los dan 833 kios. Selain pasar, Kota Pasuruan juga memiliki kawasan niaga yang berlokasi di sekitar alun-alun kota.

### **3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Pasuruan Tahun 2012**

Perekonomian Kota Pasuruan baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan yang akan datang, baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Kota Pasuruan sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian nasional dan internasional (global).

Berdasarkan kondisi tersebut, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kota Pasuruan pada Tahun 2012 diperkirakan adalah: **pertama**, ketergantungan pangan terhadap produk impor; fenomena ini akan mengakibatkan ketersediaan produk pangan terganggu, sehingga terjadi ketidakstabilan harga di pasaran; **kedua**, terjadinya krisis energi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi terhadap meningkatnya tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, sementara perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia berpotensi menurunkan kinerja ekspor. sehingga perlu upaya pengembangan energi alternatif dan substitusi energi; **Ketiga**, makin beratnya beban pemerintah dalam penyediaan subsidi komoditas seperti energi dan pangan serta produk lainnya yang akan menuntut peran daerah yang lebih besar dalam pengelolaan pembangunan daerahnya; **keempat**, makin beratnya persaingan antar negara dan antar wilayah dalam upayanya menarik Investasi. Ketimpangan daya tarik

menyebabkan investasi tidak merata penyebarannya; **kelima**, makin tingginya desakan implementasi pembangunan yang berkelanjutan serta *food safety*; **keenam**, regulasi perekonomian nasional.

Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian Kota Pasuruan untuk Tahun 2012 diperkirakan adalah: **Pertama**, jumlah penduduk; kondisi ini di satu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun disisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi. **Kedua**, ketersediaan

infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik, akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi para investor. **Ketiga**, penurunan kontribusi sektor primer yang mengakibatkan terjadinya pengangguran kentara (*daesgues employment*) dan urbanisasi. **Keempat**, iklim ketentraman dan ketertiban yang kondusif; kondisi ini sangat mempengaruhi kelancaran usaha dan aktivitas ekonomi.

Tantangan-tantangan tersebut di atas sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangaunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya, serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya, sehingga terjadinya sinergitas dan kebersamaan dari semua stakeholders pembangunan di Kota Pasuruan.

Prospek perekonomian Kota Pasuruan pada Tahun 2012 diperkirakan tetap optimis, walaupun dihadapkan pada tantangan semakin berat. Optimisme terhadap ekonomi Kota Pasuruan muncul seiring dengan kondisi makro ekonomi yang semakin membaik dari tahun ketahun.

Kombinasi antara tingkat inflasi dan suku bunga yang diharapkan dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2012. Disamping itu belanja pemerintah melalui APBN dan APBD, serta momentum pemilihan umum kepala daerah tahun 2010, melalui anggarannya, diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan.

Di sisi permintaan, sektor konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan. Pertumbuhan

sektor konsumsi rumah tangga ditopang oleh perbaikan daya beli yang bersumber dari kenaikan gaji dan Upah Minimum Provinsi (UMP), serta penyaluran kredit konsumsi oleh perbankan. Realisasi investasi diperkirakan semakin meningkat didukung oleh semakin luasnya implementasi program pelayanan terpadu satu pintu (PPTSP) baik di Kota Pasuruan. Sementara itu, stimulus fiskal pemerintah daerah diperkirakan semakin meningkat. Disamping itu kecenderungan peningkatan realisasi kredit produktif untuk UMKM akan mampu mendorong produksi produk unggulan yang berdaya saing ekspor sebagai produk utuh maupun sebagai bahan baku produk lainnya. Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan diperkirakan didorong oleh sektor perdagangan.

Disamping pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan yang semakin membaik, akuntabilitas kinerja pemerintahan juga diharapkan akan semakin membaik, seiring dengan tumbuhnya komitmen terhadap optimalisasi Gerakan Anti Korupsi. Keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Untuk itu, perlu dilakukan terobosan-terobosan melalui pencarian sumber-sumber pembiayaan non-APBD baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

### **3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kemampuan keuangan daerah yang terbatas menyebabkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas pula. Maka dari itu, kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong peran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dengan cara mengeliminir berbagai kendala yang timbul yang dapat menghambat tumbuhnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Disamping itu langkah-langkah kebijakan yang lebih serius perlu ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini, antara lain di sektor industri kecil-menengah, perdagangan dan jasa.

Kebijakan keuangan Kota Pasuruan tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2009 dan 2010

dari angka 5,03% menjadi 5,66%. Kenaikan ini memberi dampak yang positif bagi perekonomian Kota Pasuruan, mengingat pada tahun 2009 sempat mengalami penurunan dari tahun 2008.

Sebagai salah satu instrumen perencanaan APBD yang disusun berdasarkan berbagai asumsi baik makro maupun mikro. Secara makro di dalam APBD diperhitungkan kondisi perekonomian regional, nasional, bahkan internasional yang mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, fluktuasi harga BBM dan komoditas penting lainnya, nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, tingkat suku bunga umum dan sebagainya. Secara mikro APBD berusaha mengakomodasi kekuatan dan kelemahan pada organisasi perangkat daerah (OPD), kemampuan sumberdaya, dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi Kota Pasuruan diarahkan pada peningkatan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan industri kecil dan menengah, perdagangan (terutama pasar tradisional) dan jasa; yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah.

Arah kebijakan keuangan Kota Pasuruan sangat tergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, penyerapan investasi untuk mendorong pertumbuhan dan kemampuan pengeluaran investasi oleh pemerintah kota. Idealnya upaya-upaya penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dipenuhi oleh kemampuan keuangan daerah tersebut. Namun mengingat keterbatasan penerimaan daerah, salah satu alternatif bagi pembangunan di Kota Pasuruan adalah kerjasama antara pihak publik dan swasta. Melihat perkembangan pembangunan di Kota Pasuruan, diperlukan paradigma peningkatan pendapatan asli daerah yang sekaligus juga dapat mendorong investasi.

Melalui peningkatan investasi, pendapatan daerah dalam jangka panjang dapat bertambah. Agar peningkatan investasi secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kota Pasuruan, maka investasi hendaknya lebih ditujukan ke sektor-sektor yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor perdagangan dan jasa, industri kecil maupun menengah.

Salah satu cara mendorong peningkatan investasi adalah dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumber daya produktif. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi termasuk listrik dan sumber daya lainnya. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi tersebut maka pemerintah menetapkan beberapa strategi sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahun 2012, yaitu melalui:

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Upaya pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan juga masih menemui beberapa kendala yang mendesak untuk dipecahkan, yang diindikasikan dari belum mantapnya kinerja beberapa indikator kesehatan. Upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu harus terus ditingkatkan. Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan dirasakan masih membutuhkan penyesuaian seiring kondisi yang berkembang, baik jumlah maupun kualitasnya.

2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi indikator makro pembangunan bidang pendidikan, diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan di Kota Pasuruan relatif baik. Namun terdapat beberapa indikator yang layak perlu dikritisi kinerjanya. Indikator APM untuk tingkat SMA/SMK/MAN yang masih berada pada angka 71,78% perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Selain itu upaya mendorong partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan guna meningkatnya pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan.

3. Percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota industri, perdagangan dan jasa.

Sektor ekonomi strategis Kota Pasuruan adalah perdagangan dan jasa, serta industri kecil-menengah. Perdagangan bebas sebagai konsekuensi globalisasi, dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi industri Kota

Pasuruan. Oleh karena itu diperlukan industri dengan produk yang berdaya saing tinggi. Namun demikian pengembangan industri, perdagangan dan jasa harus tetap memperhatikan aspek wilayah dan lingkungan hidup. Peningkatan peran industri kecil-menengah akan memberikan akses masyarakat dalam memenuhi hak atas pekerjaan dan usaha. Pemenuhan hak atas pekerjaan harus disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui pendidikan formal, pelatihan dan pengembangan ketrampilan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan sumber daya manusia komprehensif dan terpadu serta penyiapan pendidikan berkualitas melalui perbaikan kurikulum dan mutu pendidikan yang sekaligus berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan manajemen usaha.

4. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan tersebut, diperlukan pula upaya dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada. Disamping itu, pembangunan ekonomi harus dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh baik bagi terpenuhinya kebutuhan pangan, terpenuhinya derajat kesehatan, meningkatnya tingkat pendidikan, terpenuhinya perumahan yang sehat dan pemukiman yang layak, terpenuhinya kebutuhan air bersih, sumber daya alam dan lingkungan hidup, terpenuhinya hak atas rasa aman dan meningkatnya partisipasi politik serta demokratisasi.

5. Meningkatkan investasi daerah.

Investasi merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi juga memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian suatu daerah.

Peningkatan investasi dapat diupayakan dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumber daya produktif.

6. Meningkatkan ketersediaan dan optimasi fungsi infrastruktur, serta ditunjang dengan pengelolaan tata ruang yang mampu memelihara kualitas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup.

Infrastruktur perkotaan terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi. Keterbatasan layanan infrastruktur wilayah baik dari segi kualitas maupun kuantitas, masih menjadi permasalahan bagi Kota Pasuruan yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah.

7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu konsep multi dimensi yang terdiri dari variabel politik, ekonomi, dan sosial budaya yang menentukan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat mencapai tujuan yang ditargetkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan adil, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

8. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum dan keadilan (*justice for all*) serta demokrasi.

Berdasarkan data yang ada, angka kriminalitas di Kota Pasuruan tergolong tinggi dengan tingkat penanganan yang kurang memadai. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak yang berwenang dan pemerintah daerah disertai peran aktif masyarakat untuk ikut mengeliminir semua bentuk pelanggaran hukum.

9. Meningkatkan kesalehan sosial dan pelestarian budaya daerah.

Masih banyak dijumpai perilaku negatif yang membelakangi norma-norma agama, seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Oleh karena itu kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu untuk ditingkatkan,

sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Di bidang budaya, bentuk pengembangan dan peningkatan potensi kesenian dan budaya Kota Pasuruan dilakukan dengan cara menyelenggarakan berbagai acara seni dan budaya.

10. Menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan PMKS.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah daerah berupaya mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar melalui penerapan berbagai bantuan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan dana PNPM. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat untuk mewujudkan kelurahan mandiri pangan, diversifikasi pangan dan bantuan bagi transportasi distribusi Raskin.

### **3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

#### **3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Anggaran pembangunan daerah Perubahan pada Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 memberikan gambaran anggaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Pasuruan. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber, antara lain, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang



Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kinerja pendapatan daerah tahun 2009 dan 2010 yang terekam pada tabel 3.2. menunjukkan hasil yang cukup baik. Hasil ini diindikasikan dengan kenaikan pendapatan daerah secara agregat dari Rp.368,- milyar pada tahun 2009 menjadi Rp.373,- milyar pada tahun 2010. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2011 dilakukan melalui kajian hasil oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan terlebih dahulu adalah menyusun proyeksi indikator makro ekonomi Kota Pasuruan dengan menggunakan data empiris. Selanjutnya hasil proyeksi tersebut dievaluasi sebagai bahan menentukan perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen pendapatan daerah yang relatif lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, bila dibandingkan dengan dua komponen lainnya.

**Tabel 3.2.**

Realisasi dan Perkiraan Pendapatan Kota Pasuruan  
Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2012

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi (Rp juta)		Proyeksi (Rp juta)	
		2009	2010	2011	2012
1	Pendapatan Asli Daerah	35.678	34.101	30.532	32.680
1.1	Pajak Daerah	6.274	6.840	6.986	7.335
1.2	Retribusi Daerah	13.507	15.680	13.700	14.659
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.677	3.967	4.053	4.660
1.4	Lain-lain PAD yang sah	12.219	7.611	5.791	6.023
2	Dana Perimbangan	297.334	284.567	306.320	324.295
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	21.023	36.803	26.373	27.692
2.2	Dana Alokasi Umum	230.764	231.964	264.131	280.771
2.3	Dana Alokasi Khusus	38.564	15.799	15.815	15.831
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.509	55.058	84.881	80.606
3.1	Hibah	0	0	0	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah	21.607	27.698	22.609	22.921

	lainnya				
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3.191	23.535	58.292	53.547
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	10.710	3.852	3.978	4.137
Jumlah Pendapatan Daerah		368.508	373.727	421.733	437.582

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pasuruan

Berdasarkan pada asumsi-asumsi di atas, maka pendapatan daerah tahun 2012 diproyeksikan sebesar Rp 437,5 milyar, yang terbagi atas beberapa jenis pendapatan, yakni: PAD senilai Rp 32,6 milyar, dana perimbangan sebesar Rp 324,2 milyar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp 80,6 milyar.

Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah tahun 2011, sekaligus meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

1. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Mengoptimalkan kinerja Badan usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; serta
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pendataan dan penghitungan target berdasarkan data potensi yang akurat;
2. Review perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
3. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD; serta
5. Peningkatan koordinasi antara SKPD dalam upaya meningkatkan PAD.

### 3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah, seperti yang diuraikan dalam APBD, disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari unit-unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan.

Urusan wajib meliputi: pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan terdiri dari: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan ketransmigrasian.

**Tabel 3.3.**

Pagu Indikatif Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung  
Tahun Anggaran 2010 dan 2011

No.	Jenis Belanja	Besaran Pagu Indikatif (Rp. juta)			
		Realisasi		Proyeksi	
		2009	2010	2011	2012
1	Belanja Tidak Langsung	210.931	244.387	267.027	291.788
	- B. Pegawai	151.562	188.614	219.395	244.265
	- B. Hibah	38.197	29.912	20.476	20.496
	- B. Bantuan Sosial	18.948	22.551	22.776	23.004
	- B. Bagi Hasil	138	130	138	152
	- B. Bantuan Keuangan	1.993	2.717	2.840	2.869
	- B. Tidak Terduga	92	460	1.400	1.000
2	Belanja Langsung	201.333	172.170	181.927	147.733
	- B. Pegawai	30.410	39.923	38.781	25.399
	- B. Barang dan Jasa	56.563	60.308	72.809	61.136
	- B. Modal	114.358	72.568	70.337	61.197
	Total Belanja	412.265	416.558	448.995	429.521

*Sumber: Bappeda Kota Pasuruan*

Realisasi kinerja belanja, dalam format belanja tidak langsung dan belanja langsung Kota Pasuruan Tahun 2009 dan 2010 seperti yang dirinci pada tabel 3.2. diatas, dapat disimpulkan bahwa total belanja mengalami peningkatan dari Rp. 412,- milyar pada tahun 2009 menjadi Rp. 416,- milyar pada tahun 2010. Belanja daerah Kota Pasuruan pada tahun 2009 dan 2010 didominasi oleh belanja tidak langsung yang persentasinya rata-rata 54,92%, diikuti oleh belanja langsung dengan porsi rata-rata 45,08%.

Proyeksi belanja Kota Pasuruan tahun 2011 dan 2012 didominasi oleh belanja tidak langsung. Namun jumlah nominal secara keseluruhan pada tahun 2011 dan 2012 ini cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 diproyeksikan belanja daerah secara keseluruhan sebesar Rp. 448,- milyar, sementara itu proyeksi belanja daerah tahun 2012 sebesar Rp. 429,- milyar.

Penggunaan proyeksi belanja akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan Kota Pasuruan, yang masih terkait dengan bidang-bidang prioritas sebelumnya, antara lain: bidang sarana dan prasarana kota, bidang pendidikan dan kesehatan, serta bidang pemerintahan.

Secara spesifik, kebijakan belanja Kota Pasuruan dirumuskan sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja langsung program diprioritaskan untuk membiayai SKPD yang merupakan SKPD utama yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.
4. Melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja Langsung SKPD dan mengalihkannya pada Belanja Langsung Program yang terkait upaya

pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan IPM.

5. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan IPM.
6. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif.

Belanja pembangunan merupakan alokasi anggaran yang disediakan untuk mendukung kinerja SKPD, melalui pelaksanaan program dan kegiatan, dalam berkontribusi terhadap pencapaian 6 prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2011. Alokasi belanja yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian prioritas-prioritas pembangunan tahun 2011, secara lebih rinci akan diuraikan pada bab IV.

### 3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih kecil dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan Penerimaan Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih besar dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk Pengeluaran Daerah. Tabel 3.4 memerinci realisasi dan proyeksi besaran masing-masing sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kota Pasuruan tahun 2011 hingga 2012.

**Tabel 3.4.**  
Realisasi Pembiayaan Tahun 2008 dan 2009 serta  
Target Pagu Indikatif Pembiayaan Daerah Tahun 2010 dan 2011

No.	Uraian	Proyeksi	
		2011	2012
1.	Saldo Kas Neraca Daerah	34.221.489.490,00	11.939.364.813,00
	Dikurangi:		
2.	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	-	-
3.	Kegiatan Lanjutan		
4.	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	34.221.489.490,00	11.939.364.813,00

Sumber: hasil analisis, 2010

Pada tabel 3.3. menunjukkan bahwa sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran mengalami penurunan pada tahun 2011 mencapai angka Rp. 34.221.489.490,00 menjadi Rp. 11.939.364.813,00 pada tahun 2012.

Tabel 3.5. menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Pasuruan diproyeksikan menurun sepanjang tahun 2011 dan 2012 dari Rp.197,00 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp.165,75 milyar pada tahun 2012 atau menurun sekitar 15,86%.

**Tabel 3.5.**

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2011–2012

No.	Uraian	Proyeksi	
		2011	2012
I.	Kapasitas riil kemampuan keuangan	197.000.538.730,16	165.752.925.210,33
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I		
II.a	Belanja Langsung	181.927.476.977,00	147.733.366.226,71
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Dikurangi:		
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	24.922.512.854,00	25.091.905.513,25
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	314.862.000,00	90.000.000,00
II.	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	163.690.102.123,00	33.201.462.496,87
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	33.310.436.607,16	33.210.462.496,87
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II dan III		
III.a	Belanja Tidak Langsung	267.027.729.245,00	291.788.300.145,65
	Dikurangi		
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	233.717.292.637,84	258.586.837.648,78
III	Total rencana pengeluaran prioritas II dan III (III.a-IIIb)	33.310.436.607,16	33.201.462.496,87
	Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III)	0,00	0,00

Sumber: hasil analisis, 2010

*Tahun 2012*

#### **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

Tantangan utama dalam perencanaan pembangunan adalah masalah pembangunan yang cenderung beragam dan dinamis, dengan pola saling terkait satu sama lain dalam suatu kompleksitas; sedangkan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pemecahan masalah tersebut, terbatas adanya. Oleh karena itu dalam penyusunan rencana pembangunan dibutuhkan proses prioritas, untuk menentukan permasalahan-permasalahan mendasar yang hendak dipecahkan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.

Memperhatikan identifikasi dan pemetaan permasalahan pembangunan di Kota Pasuruan, sebagaimana terungkap pada sub bab 2.3. di atas, sekaligus memperhatikan hasil evaluasi atas indikator makro pada sub bab 2.1.; maka dapat diketahui bahwa masalah pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, pemerataan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, masih menjadi isu strategis yang akan mewarnai penetapan prioritas pembangunan Kota Pasuruan 2012.

Demi mewujudkan konsistensi dan kesinambungan antar tahun perencanaan; maka penetapan prioritas pembangunan 2012, hendaknya mengacu pada agenda pembangunan 2011-2015. Review RKPD 2012 ini disusun, dokumen RPJMD Kota Pasuruan 2011-2015 telah menyelesaikan tahap finalisasi agenda pembangunan, yang perlu disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih; sehingga dan belum menetapkan prioritas untuk setiap agenda tersebut. Oleh karena itu poin-poin agenda pembangunan tersebut, untuk sementara, akan dijadikan prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2012.

Selain itu, penetapan prioritas pembangunan daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 juga mengacu pada prioritas nasional, dan Provinsi Jawa Timur; sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari

*Tahun 2012*

tingkat pusat hingga daerah. Tentunya, pemilihan prioritas disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kota Pasuruan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana diketahui, kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan, dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Sehubungan dengan itu, maka prioritas pembangunan Kota Pasuruan pada Tahun 2012, difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta didukung oleh upaya-upaya untuk menciptakan keadaan yang lebih aman, adil dan demokratis, antara lain :

**4.1 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan**

Pembangunan pendidikan terus menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Pasuruan dan telah memberikan cukup banyak kontribusi dalam memajukan Kota Pasuruan, namun ditinjau tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2011 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni dari angka 75,70 pada tahun 2010 menjadi 70,36 pada tahun 2011 menjadi catatan tersendiri bagi pembangunan di bidang pendidikan di Kota Pasuruan. Pemerintah Kota Pasuruan telah berupaya memberikan layanan pendidikan yang memadai bagi segenap warga Kota Pasuruan, melalui pelaksanaan berbagai program strategis antara lain pemberian BOP bagi siswa SD, SMP, baik negeri maupun swasta, serta pemberian BOP bagi siswa SMAN/SMKN. Hingga saat ini Pemerintah Kota Pasuruan telah menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun, dan sedang merintis upaya penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun pada periode perencanaan 2011-2015.

Namun demikian, pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan masih menyisakan beberapa masalah mendesak yang menuntut upaya pemecahan pada tahun 2012, antara lain adalah: tingkat pendidikan penduduk yang relatif masih rendah; kesenjangan partisipasi pendidikan relatif masih lebar; manajemen pendidikan belum efektif dan efisien.



## Tahun 2012

Memperhatikan kondisi dan permasalahan di atas, maka pada tahun 2012 ditetapkan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya secara nyata proporsi penduduk, terutama penduduk miskin, yang dapat menyelesaikan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
2. Meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar;
3. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini;
4. Meningkatnya proporsi tenaga pendidik formal dan non formal, negeri maupun swasta, yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi, sesuai jenjang kewenangan mengajar yang disesuaikan dengan perkembangan jumlah peserta didik;
5. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik formal dan non formal, negeri maupun swasta, agar dapat mengembangkan kompetensinya; serta
6. Meningkatnya efektivitas peran dewan pendidikan dan komite sekolah.

Guna mendukung pencapaian sasaran-sasaran dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan pada tahun 2012, maka disusun rencana program sebagaimana tersaji dalam tabel 4.1. Pagu belanja indikatif yang dianggarkan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan mencapai angka sebesar Rp. 45.793.439.010,-.

**Tabel 4.1. Program dan Pagu Indikatif Pencapaian Prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Tahun 2012**

NO.	PROGRAM	SUMBER PENDANAAN			KET	SKPD
		APBD	APBD PROVINSI	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	195.800.000	-	-		Diknas
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	9.514.747.520	7.000.000	-	DAU + DAK	Diknas

Tahun 2012

NO.	PROGRAM	SUMBER PENDANAAN			KET	SKPD
		APBD	APBD PROVINSI	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
3	Program Pendidikan Menengah	1.665.500.000	1.038.000.000	-		Diknas
4	Program Pendidikan Non Formal	125.420.000	195.000.000	-		Diknas
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	449.275.000	-	-		Diknas
6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	0	-	-		Diknas
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	75.000.000	-	-		Diknas
8	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah	3.403.094.250	-	500.000.000	DAU + DAK	Diknas
9	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	2.833.213.350	-	13.999.768.404		Diknas
10	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	672.117.640	-	-		Diknas
11	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah	650.239.000	-	-	DAU + DAK	Diknas
12	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran Sekolah Dasar	2.357.100.000	-	-		Diknas
13	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran Sekolah Menengah	2.296.255.250	-	-		Diknas
14	program belanja hibah	21.555.677.000	-	-		Diknas
	<b>JUMLAH</b>	<b>45.793.439.010</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>14.499.768.404</b>		

Sumber: SKPD Kota Pasuruan, diolah

#### 4.2 Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan memiliki kesalingterkaitan yang kuat dalam menentukan kualitas sumber daya manusia suatu daerah. Secara umum pembangunan bidang kesehatan di Kota Pasuruan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, terutama dalam penyediaan sarana layanan kesehatan. Penyelesaian pengembangan sarana Rumah Sakit Umum dr. Sudharsono pada tahun 2012 ini, diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat secara lebih berkualitas.

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi penduduk miskin; maka Pemerintah Kota membina kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah pusat, untuk memberikan

*Tahun 2012*

keringanan biaya layanan kesehatan, baik dalam format jaminan layanan kesehatan masyarakat (jamkesmas) maupun jaminan layanan kesehatan masyarakat daerah (jamkesmasda). Pemberian layanan kesehatan ini diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kelompok miskin.

Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang, hal ini diindikasikan dengan belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan; terbatasnya tenaga kesehatan; rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin; kurangnya pola perilaku hidup bersih dan sehat.

Meski Pemerintah Kota terus berupaya meningkatkan kualitas rumah sakit dan puskesmas, namun kualitas pelayanan sebagian besar diantaranya masih belum memenuhi harapan masyarakat, terhadap mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas; umumnya mengenai: keterlambatan pelayanan, administrasi yang berbelit dan lamanya waktu tunggu.

Walaupun dari tahun ke tahun perkembangan kesehatan masyarakat terus mengalami peningkatan, tetapi tidak dapat dipungkiri masih terdapat disparitas status kesehatan yang cukup signifikan antar kelas sosial ekonomi. Disparitas ini antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan status gizi anak.

Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena terkendala biaya dan transportasi. Utilitasi rumah sakit masih didominasi golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas.

Pemerintah Kota terus berupaya meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Namun demikian, pasien masyarakat miskin ternyata tak mudah mengakses pelayanan jaminan kesehatan yang disediakan bagi mereka. Paradigma pemberian jaminan kesehatan belum berorientasi kepada subjek, yakni orang miskin, namun pada jenis

*Tahun 2012*

penyakit yang diderita; sehingga pembebasan biaya berobat berlaku selektif untuk jenis penyakit tertentu.

Salah satu faktor penting yang juga mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan. Oleh karena itu Pemerintah Kota berupaya meningkatkan kualitas ketersediaan perumahan yang layak, air bersih dan sanitasi dasar. Masih kurangnya kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, juga menjadi perhatian penting untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Memperhatikan kondisi dan permasalahan di atas, maka pada tahun 2011 ditetapkan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, serta menjamin perlindungan resiko bagi masyarakat akibat pengeluaran biaya kesehatan;
2. Meningkatnya efektivitas jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, yang berorientasi kepada subyek manusianya bukan jenis penyakit;
3. Meningkatnya fungsi dan kualitas puskesmas dan jaringannya secara merata untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas;
4. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu maternal dan membaiknya status gizi balita.
5. Meningkatnya penanggulangan Narkoba/PMS HIV/AIDS;
6. Meningkatnya sosialisasi kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat; serta
7. Terwujudnya pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.

Pencapaian sasaran-sasaran di atas, ditempuh melalui pelaksanaan serangkaian program dengan nilai pagu belanja mencapai Rp. 32.851.182.196,- sebagaimana terperinci dalam tabel 4.2.

Tahun 2012

**Tabel 4.2. Program dan Pagu Indikatif Pencapaian Prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2012**

NO.	PROGRAM	SUMBER PENDANAAN			KET	SKPD
		APBD	APBD PROVINSI	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.275.000.000	-	-	DAU + DAK	Dinkes
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.586.302.120	-	549.391.000	DAU + DAK	Dinkes
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	35.000.000	-	-		Dinkes
4	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	20.000.000	-	-		Dinkes
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	496.589.750	-	-		Dinkes
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	240.000.000	-	-		Dinkes
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	505.000.000	-	-		Dinkes
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	10.000.000	-	-		Dinkes
9	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	359.941.800	-	368.174.000		Dinkes
10	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	516.200.000	-	-		Dinkes
11	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	20.000.000	-	-		Dinkes
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	40.000.000	-	-		Dinkes
13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	60.000.000	-	-		Dinkes
14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	10.000.000	-	-		Dinkes
15	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	619.845.600	-	-		Dinkes
16	Belanja Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi swasta sosial	300.000.000	-	-		Dinkes
17	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	98.000.000	-	-		Dinkes
18	Belanja Bantuan Sosial Untuk Partisipasi Pelayanan Sosial	2.225.579.676	-	-		Dinkes
19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	669.644.000	-	-		RSUD
20	Program Obat dan Perbekalan	3.100.000.000	-	-		RSUD
21	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	7.079.592.000	-	-		RSUD
22	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	217.610.000	-	-		RSUD
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.028.767.500	-	-		RSUD
24	Program Pengadaan Peningkatan Sarana rumah Sakit/RS Jiwa/RS Mata/RS Paru-Paru	3.092.293.750	-	-		RSUD

Tahun 2012

NO.	PROGRAM	SUMBER PENDANAAN			KET	SKPD
		APBD	APBD PROVINSI	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
25	Program Pemeliharaan Sarana Dan PrasaranRS/RS Jiwa/RS Paru-paru//RS Mata	130.516.000	-	-		RSUD
26	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	115.300.000	-	-		RSUD
<b>JUMLAH</b>		<b>32.851.182.196</b>	<b>0</b>	<b>917.565.000</b>		

Sumber: SKPD Kota Pasuruan, diolah

### 4.3 Perluasan Lapangan Kerja Dan Penanggulangan Kemiskinan

Perluasan lapangan kerja untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah dan mutu yang semakin meningkat, merupakan sebuah keniscayaan untuk menyerap angkatan kerja baru yang terus bertambah setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan yang relatif menggembirakan, ternyata tidak serta merta mengurangi tingkat pengangguran.

Dampak krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008, diperkirakan pada tahun 2009 mulai mempengaruhi sektor riil dan kegiatan ekonomi masyarakat; ditandai dengan ancaman pemutusan hubungan kerja dalam jumlah cukup besar dan pengangguran. Kondisi ini perlu diantisipasi sedini mungkin. Upaya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui program yang terkoordinasi dan terpadu, semakin membutuhkan kerja keras seluruh pemangku kepentingan.

Sasaran perluasan lapangan kerja adalah meningkatnya jumlah lapangan kerja, baik formal maupun non formal, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang terserap dalam lapangan kerja, antara lain melalui:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pekerja melalui perbaikan pelayanan pendidikan, pelatihan serta pelayanan kesehatan;
2. Meningkatnya jejaring pengaman PHK melalui perluasan kesempatan kerja padat karya untuk menampung tenaga kerja;
3. Meningkatnya program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja, membentuk berbagai bursa kerja serta memperbaiki sistem pelatihan bagi pencari kerja; serta

*Tahun 2012*

4. Meningkatnya fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, *outsourcing*, pengupahan, PHK serta hubungan industrial ketenagakerjaan.

Kemiskinan dipahami tidak sebatas ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan fisik, tapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar, dan perbedaan perlakuan bagi seseorang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar tersebut adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan dan sanitasi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota untuk mengentas masyarakat miskin, mulai dari bantuan dan perlindungan sosial rumah tangga miskin hingga pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dari yang bersifat penyelamatan atau *rescue* (yakni upaya jangka pendek untuk menyelamatkan rumah tangga miskin agar tidak semakin terpuruk akibat kenaikan harga BBM), sampai dengan upaya pemulihan atau *recovery* (yakni upaya jangka panjang untuk pengurangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan, pengembangan sarpras ekonomi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia)

Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan multi-sektoral. Namun sekeras apa pun upaya yang dilakukan, kemiskinan tidak mungkin dapat diatasi secara tuntas, karena kemiskinan pada hakikatnya bukanlah variabel statis melainkan dinamis.

Sasaran penanggulangan kemiskinan terkait dengan sasaran yang tercantum dalam prioritas pembangunan lain, termasuk program-programnya. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah menurunnya secara nyata jumlah penduduk miskin dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin. Secara rinci, sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatnya program penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan prakarsa dan keragaman lokal, dengan menempatkan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial;

## Tahun 2012

2. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan;
3. Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan; serta
4. Tersedianya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang bermutu bagi penduduk miskin.

Secara menyeluruh, tabel 4.3. memberikan rincian program dan pagu belanja indikatif yang ditujukan untuk mencapai prioritas memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat.

**Tabel 4.3. Program dan Pagu Indikatif Pencapaian Prioritas Perluasan Lapangan Kerja Dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012**

NO.	PROGRAM	SUMBER PENDANAAN			KET	SKPD
		APBD	APBD PROVINSI	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	437.281.500	-	-		Dinsosnaker
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	495.000.000	-	-		Dinsosnaker
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	363.000.000	-	-		Dinsosnaker
4	Program Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan Tenaga Kerja	385.000.000	-	-		Dinsosnaker
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	425.613.000	-	-		BPPKB
<b>JUMLAH</b>		<b>2.105.894.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Sumber: SKPD Kota Pasuruan, diolah

#### 4.4 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Sejalan dengan masalah penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesejahteraan sosial menghadapi tantangan semakin berat dari tahun ke tahun. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Pasuruan, maka kompleksitas dan kuantitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) juga turut meningkat sejalan perkembangan perubahan sosial masyarakat.



## Tahun 2012

Penanganan PMKS, khususnya fakir miskin, jika tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial.

Sasaran pembangunan dan perlindungan kesejahteraan sosial rakyat adalah meningkatkan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan penduduk yang menyandang masalah kesejahteraan sosial, yang ditandai dengan:

1. Terpadunya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat, antara lain korban bencana alam;
2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan sosial dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal; serta
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan model kelembagaan, yang responsif dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi masyarakat rentan masalah sosial.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran-sasaran yang ditujukan pada pengentasan kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pemberdayaan masyarakat; maka dirancang beragam program dan kegiatan pembangunan tahun 2012, dengan nilai belanja indikatif sebesar Rp. 425.613.000,-.

**Tabel 4.4. Program dan Pagu Indikatif Pencapaian Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun 2012**

NO.	URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Keluarga Berencana	379.959.000	-	-		BPPKB
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	55.000.000	-	-		BPPKB

Tahun 2012

NO.	URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
3	Program Pelayanan Kontrasepsi	175.000.000	-	-		BPPKB
4	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri	336.222.000	-	-		BPPKB
5	Program Pengembangan PIK KRR	60.000.000	-	-		BPPKB
6	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	236.400.650	-	-		BPPKB
7	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	93.663.200	-	-		Dinsosnaker
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	675.500.000	-	-		Dinsosnaker
9	Program Bantuan Sosial	3.246.000.000	-	-		Dinsosnaker
10	Program Pembinaan kepada Lembaga/Organisasi Swasta Kependidikan	300.000.000	-	-		Dinsosnaker
11	Program Pembinaan lembaga sosial/kemasyarakatan	180.000.000	-	-		Dinsosnaker
12	Program Pembinaan Kepada Organisasi Kewanitaan	75.000.000	-	-		Dinsosnaker
13	Pembinaan Partisipasi Pelayanan Sosial	300.000.000	-	-		Dinsosnaker
14	Program Pembinaan Lembaga/Kemasyarakatan Keagamaan	5.426.400.000	-	-		Dinsosnaker
15	Program Ketersediaan dan Kewaspadaan	356.200.000	-	-		KKP
16	Program Penganekaragaman Pangan	207.000.000	-	-		KKP
17	Program Bimbingan dan Intensifikasi Peningkatan Ketahanan Pangan	105.465.700	-	-		KKP
18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	498.122.010	-	-		Bapemas
19	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	0	-	-		Bapemas
20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	254.533.750	-	-		Bapemas
21	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kelurahan	26.305.500	-	-		Bapemas
22	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	822.375.000	-	-		Bapemas
23	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	50.841.750	-	-		Bapemas
24	Bantuan / Hibah	5.086.540.000				Bapemas
25	Program Transmigrasi Regional	404.433.500	-	-		Dinsosnaker
<b>JUMLAH</b>		<b>19.350.962.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Sumber: SKPD Kota Pasuruan, diolah

*Tahun 2012*

#### **4.5 Peningkatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan kesejahteraan sosial tidak lepas dari peningkatan peran perempuan dalam keluarga maupun aktivitas sosial. Pengarusutamaan gender, menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai pelaku yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.

Hal ini dilandasi indikasi masih adanya ketidaksetaraan partisipasi antara perempuan dengan laki-laki. Disamping itu masih ada berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan, juga terdapat kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.

Budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada pada posisi tawar yang lemah, sementara suara perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Masalah keterwakilan suara dan kebutuhan perempuan sangat penting, karena kebijakan yang netral gender hanya akan melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan, yang berakibat pada pemiskinan kaum perempuan.

Sasaran yang hendak dicapai peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesetaraan gender dan keluarga sejahtera adalah:

1. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki;
2. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas;
4. Meningkatnya pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan; serta
5. Terbinanya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

## Tahun 2012

Secara menyeluruh, tabel 4.5. memberikan rincian program dan pagu belanja indikatif yang ditujukan untuk mencapai prioritas meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak.

**Tabel 4.5. Program dan Pagu Indikatif Pencapaian Prioritas Peningkatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012**

NO.	URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	144.871.000	-	-		BPPKB
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	153.000.000	-	-		BPPKB
3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	109.975.000	-	-		BPPKB
4	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA)	127.950.000	-	-		BPPKB
<b>JUMLAH</b>		<b>535.796.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Sumber: SKPD Kota Pasuruan, diolah

#### 4.6 Peningkatan Peran Pemuda dan Keolahragaan

Kebudayaan merupakan artefak yang dihasilkan dari interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu penguatan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemberdayaan sosial. Kebudayaan daerah mengandung nilai-nilai luhur yang diperlukan untuk menumbuhkan kearifan lokal, yang dibutuhkan untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat

Namun demikian, upaya-upaya pelestarian budaya daerah dihadapkan pada beragam masalah yang diakibatkan oleh gencarnya arus globalisasi. Nilai-nilai budaya asing yang kental dengan aroma individualisme dan hedonistik, berpotensi menimbulkan friksi ketika bersentuhan dengan nilai-nilai ketimuran yang lekat dengan semangat komunal dan nilai religius.

Pemuda sebagai bagian dari penduduk merupakan aset pembangunan, terutama pada era pasar bebas global. Sebagai generasi penerus,

Tahun 2012

pemuda harus memiliki keunggulan dan daya saing dalam menghadapi tantangan dan mampu memanfaatkan peluang sebaik-baiknya.

Olahraga merupakan kegiatan individu dan masyarakat yang diyakini mampu menjadi kekuatan untuk meningkatkan kualitas masyarakat seutuhnya. Atas dasar pemikiran ini, maka menumbuhkan budaya olahraga yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi aspek penting dalam peningkatan kualitas manusia.

Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan peran pemuda dan pengembangan olahraga adalah:

1. Meningkatnya pengembangan nilai budaya daerah untuk memperkuat dan menegaskan jati diri budaya masyarakat daerah;
2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kesenian daerah;
3. Terciptanya pemuda yang bermoral, produktif dan mandiri;
4. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;
5. Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, serta prestasi olahraga; serta
6. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran-sasaran yang ditujukan pada perwujudan kelestarian seni dan budaya, pemberdayaan pemuda dan pemasyarakatan olah raga; maka dirancang beragam program dan kegiatan pembangunan tahun 2012, dengan nilai belanja indikatif sebesar Rp. 5.726.957.500,-.

**Tabel 4.6. Program dan Pagu Indikatif Pencapaian Prioritas Peningkatan Peran Pemuda dan Keolahragaan Tahun 2012**

NO.	URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Peran Aktif Pemuda	290.000.000	-	-		Dispora

Tahun 2012

NO.	URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	580.000.000	-	-		Dispora
3	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga	601.957.500	-	-		Dispora
4	Program Bantuan Sosial kepada Organisasi Kepemudaan	255.000.000	-	-		Dispora
5	Program Hibah kepada badan/lembaga/organisasi/swasta	3.800.000.000	-	-		Dispora
6	Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	200.000.000	-	-		Dispora
<b>JUMLAH</b>		<b>5.726.957.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Sumber: SKPD Kota Pasuruan, diolah

#### 4.7 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil & Menengah Serta Peningkatan Iklim Investasi Usaha

Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan didominasi oleh sektor perdagangan, industri dan jasa. Lebih jauh, pelaku usaha pada sektor-sektor tersebut didominasi oleh kelompok usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk koperasi, diberi porsi peran yang lebih besar dalam struktur ekonomi. Keberadaan koperasi dan UMKM selama ini mampu menjadi sumber nafkah masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja, meski memiliki nilai tambah yang lebih kecil daripada industri skala usaha besar.

Pada sektor industri, UMKM mewujud dalam bentuk industri kerajinan rumah tangga (IKRT) yang bergerak pada sub sektor pengolahan kayu dan mebel, serta sub sektor pengecoran logam. Sebagaimana IKRT di daerah lain, IKRT Kota Pasuruan juga menghadapi kendala klise berupa kesulitan permodalan, bahan baku, teknik produksi hingga pengembangan jaringan pasar.

Adapun koperasi di Kota Pasuruan sebagian besar bergerak di sektor jasa keuangan. Keberadaan koperasi ini turut andil dalam menunjang

*Tahun 2012*

keberlangsungan sektor riil ekonomi regional yang banyak tersebar pada sektor industri dan perdagangan. Pengelolaan usaha yang masih jauh dari kesan profesional, menimbulkan ancaman tersendiri bagi keberlangsungan usaha koperasi.

Sasaran pemberdayaan UMKM adalah makin meluasnya lapangan kerja yang bisa disediakan, meningkatnya secara signifikan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran pemberdayaan koperasi adalah meningkatnya posisi tawar dan efisiensi serta menguatnya kelembagaan koperasi; sehingga dapat turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya.

Secara terperinci, sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai tambah UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal dalam struktur ekonomi regional; serta
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai jati diri koperasi.

Aktivitas perindustrian Kota Pasuruan sebagian besar digerakkan oleh sektor pengolahan kayu dan mebel serta sektor pengecoran logam. Apabila ditilik dari karakteristik usaha, sebagian besar pelaku usaha industri berasal dari kelompok industri kecil rumah tangga (IKRT), dengan jumlah pegawai antara 3-7 orang, menyimpan nilai positif sekaligus negatif bagi pengembangan industri mebel dan cor logam. Dari aspek penyerapan tenaga kerja, IKRT mebel dan cor logam dengan karakter *labour intensive* (padat tenaga kerja) mampu menyediakan lapangan kerja yang relatif besar. Namun demikian, karakter *labour intensive* juga menimbulkan dampak buruk bagi efisiensi produksi.

Dewasa ini, kinerja industri Kota Pasuruan menghadapi masalah kelangkaan dan mahalanya bahan baku (terutama industri mebel); serta tata niaga produk mebel dan cor logam yang cenderung merugikan

*Tahun 2012*

pengrajin. Umumnya pengrajin memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap tengkulak dalam memasarkan produknya. Tingginya ketergantungan itu menyebabkan lemahnya daya tawar mereka, sehingga pengrajin selalu dirugikan ketika bertransaksi dengan tengkulak.

Sasaran utama dalam pembangunan industri adalah meningkatnya peran industri kecil menengah (IKM) dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM.

Seperti halnya sektor industri, aktivitas perdagangan Kota Pasuruan juga digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada sektor perdagangan, UMKM mewujud dalam bentuk toko-toko pracangan di perkampungan dan pedagang di pasar-pasar tradisional. Aktivitas perdagangan UMKM itu turut berperan serta dalam memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat Kota Pasuruan.

Ekspansi jaringan ritel nasional dengan konsep waralaba, juga menjangkau wilayah Kota Pasuruan. Konsekuensinya, persaingan langsung antara pasar tradisional (diperankan pelaku UMKM ) dengan pasar modern (jaringan ritel waralaba) merupakan hal yang tidak terhindarkan. Keunggulan economic of scale yang dimiliki pasar modern merupakan faktor yang menyebabkan persaingan tersebut tidak berlangsung secara seimbang.

Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pembangunan sektor perdagangan adalah meningkatnya peran UMKM perdagangan dalam menunjang kelancaran distribusi barang pada pasar domestik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peran sektor primer (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan) juga menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan perniagaan, serta penurunan daya dukung sumber daya laut yang ditengarai mengalami gejala *over fishing*.

Revitalisasi sektor primer dalam arti luas dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja dan mengentas kemiskinan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam arti



*Tahun 2012*

menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan, tanpa mengesampingkan sektor lain.

Sementara itu, ekonomi biaya tinggi masih menjadi penghambat utama bagi kinerja investasi daerah. Prosedur pengurusan ijin yang berbelit, tidak hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan daerah, seperti penciptaan lapangan kerja.

Sasaran revitalisasi pertanian adalah meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, dan meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan. Secara terperinci, sasaran-sasaran dalam pembangunan bidang pertanian, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya secara nyata pendapatan petani dan nelayan, terutama dari keluarga miskin;
2. Meningkatnya produksi keragaman tanaman pangan untuk pengamanan kemandirian pangan; serta
3. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kehutanan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Investasi merupakan aktivitas yang diyakini turut memiliki andil dalam menggerakkan kinerja ekonomi riil, terutama sektor perdagangan dan industri, yang selama ini dikenal sebagai sektor unggulan Kota Pasuruan. Oleh karenanya Pemerintah Kota terus berupaya mempersiapkan segala infrastuktur dan mempermudah perijinan untuk menarik investasi ke Kota Pasuruan.

Sementara itu, ekonomi biaya tinggi masih menjadi penghambat utama bagi kinerja investasi daerah. Prosedur pengurusan ijin yang berbelit, tidak hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan daerah, seperti penciptaan lapangan kerja.

## Tahun 2012

Secara terperinci, sasaran-sasaran dalam upaya peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan investasi dan perijinan untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi; serta
2. Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga perannya terhadap PDRB meningkat, terutama investasi di sektor perdagangan, jasa dan industri.

Secara menyeluruh, tabel 4.7. memberikan rincian program dan pagu belanja indikatif yang ditujukan untuk mencapai prioritas meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui penguatan ekonomi rakyat.

**Tabel 4.7. Program dan Pagu Indikatif Pencapaian Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil & Menengah Serta Peningkatan Iklim Investasi Usaha Tahun 2012**

NO.	URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM.	305.625.000	-	-		Koperindag
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	425.000.000	-	-		Koperindag
3	Program Pemberdayaan Koperasi	372.766.000	-	-		Koperindag
4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM.	195.393.750	-	-		Koperindag
5	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian KSP/USP	52.600.000	-	-		Koperindag
6	Program Belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan.	30.000.000	-	-		Koperindag
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.385.204.040	-	-		BPMPT
8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	321.074.270	-	-		BPMPT
9	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	438.267.700	-	-		BPMPT
10	Program Peningkatan Kualitas	82.650.550				

Tahun 2012

NO.	URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Perijinan					
11	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	56.192.000	-	-		Disperta
12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi	452.074.000	-	-		Disperta
13	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	311.455.000	-	-		Disperta
14	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	533.263.000	-	-		Disperta
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	43.283.000	-	-		Disperta
16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	113.726.000	-	-		Disperta
17	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	80.371.000	-	-		Disperta
18	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	9.105.000	-	-		Disperta
19	Pengembangan Usaha Perkebunan Rakyat	20.000.000	-	-		Disperta
20	Program Peningkatan pelayanan UPT RPH	55.000.000	-	-		Disperta
21	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	42.197.000	-	-		Disperta
22	Program Peningkatan Sumber Daya Hutan Mangrove	15.000.000	-	-		Disperta
23	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	25.000.000	-	-		Disperta
24	Program Pengembangan SDM Kehutanan	49.050.000	-	-		Disperta
25	Program Pemasaran Pariwisata	561.025.000	-	-		Dispora
26	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	100.000.000	-	-		Dispora
27	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	59.750.000	-	-		Disperta
28	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	20.000.000	-	-		Disperta
29	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	47.000.000	-	-		Disperta
30	Program Pengembangan	135.000.000	-	-		Disperta

Tahun 2012

NO.	URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
	Budidaya Perikanan					
31	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	400.000.000	-	-	DAK	Disperta
32	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	153.000.000	-	-	DAU + DAK	Disperta
33	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	25.000.000	-	-		Disperta
34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	750.000.000	-	-	DAK	Disperta
35	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	338.650.000	-	-		Diskoperindag
36	Program Pengembangan Kerjasama Perdagangan Internasional	94.950.000	-	-		Diskoperindag
37	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.120.498.500	-	-		Diskoperindag
38	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.854.578.500	-	-		Diskoperindag
39	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	633.000.000	-	-		Diskoperindag
40	Program Penataan Struktur Industri	214.893.000	-	-		Diskoperindag
41	Program Pembinaan Industri	498.879.000	-	-		Diskoperindag
42	Program Peningkatan Kemampuan Sistem Produksi	595.827.500	-	-		Diskoperindag
43	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	143.385.000	-	-		Diskoperindag
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.159.733.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Sumber: SKPD Kota Pasuruan, diolah

#### 4.8 Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan regional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aktivitas sosial. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung distribusi, baik barang maupun penumpang. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan

*Tahun 2012*

pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya yang cukup besar; sehingga tidak dapat dipikul oleh Pemerintah sendiri. Oleh karena itu, perlu dicari solusi alternatif untuk menanggulangi masalah perawatan dan perbaikan infrastruktur yang rusak.

Ketidakseimbangan antara pasokan dengan kebutuhan sumber daya air menjadi permasalahan yang dihadapi dari tahun ke tahun. Ketersediaan air yang melimpah pada musim hujan, selain memberi manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah pula menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya, berupa kekeringan yang berkepanjangan.

Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis telah mengarah pada tingkat peningkatan daya rusak air yang semakin serius. Selain itu, kelangkaan air telah mendorong pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah dan intrusi air laut.

Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi; sebagai akibat dari adanya kerusakan dalam berbagai tingkatan, berkurangnya ketersediaan air dan belum tercukupinya dana operasi dan pemeliharaan yang memadai. Selain penurunan keandalan layanan irigasi, luas sawah produktif beririgasi juga makin menurun karena alih fungsi lahan menjadi lahan non pertanian, terutama perumahan.

Transportasi merupakan urat nadi perekonomian, sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, sedikit banyak, bergantung pada infrastruktur transportasi. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung perwujudan Kota Pasuruan sebagai kota perdagangan, industri dan jasa.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi sektor transportasi meliputi aspek kapasitas, kondisi, jumlah dan kuantitas prasarana dan sarana fisik;

*Tahun 2012*

kelembagaan dan peraturan; sumber daya manusia; teknologi; pendanaan serta manajemen operasi dan pemeliharaan.

Penurunan kondisi jalan antara lain disebabkan kualitas konstruksi jalan yang belum optimal, pembebanan yang berlebih, bencana alam banjir serta menurunnya kemampuan pembiayaan pemeliharaan jalan.

Permasalahan utama pembangunan perumahan adalah makin meningkatnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah dan meningkatnya kawasan kumuh. Pembangunan sarana air minum menghadapi rendahnya cakupan layanan PDAM, sulitnya menurunkan tingkat kebocoran, penetapan tarif masih di bawah biaya produksi.

Pembangunan air limbah menghadapi masalah rendahnya cakupan pelayanan air limbah, dan rendahnya perilaku masyarakat dalam penanganan air limbah. Sementara itu, permasalahan di bidang persampahan adalah menurunnya kualitas pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) dan makin terbatasnya lahan di kawasan perkotaan untuk TPA.

Pembangunan drainase menghadapi masalah makin meluasnya daerah genangan yang disebabkan berkurangnya lahan terbuka hijau, tidak berfungsinya saluran drainase secara optimal, terpakainya saluran drainase untuk pembuangan sampah.

Secara spesifik, sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana transportasi;
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas pelayanan transportasi, terutama keselamatan transportasi;
3. Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas maupun kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan;
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas air baku untuk pengolahan air minum, disertai meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;

## Tahun 2012

5. Terwujudnya pengembangan sistem air limbah dengan memanfaatkan instalasi pengolahan air limbah perkotaan;
6. Meningkatnya volume persampahan yang terangkut di kawasan perkotaan serta meningkatnya kinerja pengelolaan sampah yang ramah lingkungan; serta
7. Meningkatnya fungsi saluran drainase sebagai pematas air hujan, sehingga mengurangi luasan daerah genangan.

Secara menyeluruh, tabel 4.8. memberikan rincian program dan pagu belanja indikatif yang ditujukan untuk mencapai prioritas meningkatkan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan Infrastruktur.

**Tabel 4.8. Program dan Pagu Indikatif Pencapaian Prioritas Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Tahun 2012**

NO.	URUSAN/ SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	76.000.000	-	-		Dishubk ominfo
2	Program pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan	50.000.000	-	-		Dishubk ominfo
3	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	974.470.000	-	-		Dishubk ominfo
4	Program peningkatan pelayanan angkutan	370.000.000	-	-		Dishubk ominfo
5	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	524.480.000	-	-		Dishubk ominfo
6	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	515.180.000	-	-		Dishubk ominfo
7	Program peningkatan pelayanan perparkiran	1.100.000.000	-	-		Dishubk ominfo
8	Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	124.711.500	-	-		Dishubk ominfo
9	Program Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas Semakin Optimal	171.250.000	-	-		Dishubk ominfo
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan	4.228.150.100	-	1.425.000.000,00	DAU + DAK	DPU

Tahun 2012

NO.	URUSAN/ SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
	Persampahan					
11	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.042.568.800	-	1.025.000.000,00		DPU
12	Program Peningkatan Areal Pemakaman	325.000.000	-	-		DPU
13	Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan	494.040.000	320.260.000,00	-		DPU
14	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	17.941.635.450	1.322.000.000,00	-	DAU + DAK	DPU
15	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1.088.100.000	-	-		DPU
16	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.277.138.200	2.343.745.800,00	-		DPU
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	104.131.750	-	-		DPU
18	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	5.077.463.500	278.000.000,00	-		DPU
19	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	7.073.283.000	-	-	DAU + DAK	DPU
20	Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	613.985.630	-	4.500.000.000,00	DAU + DAK	DPU
21	Program Pengembangan Perumahan	3.199.820.000	2.729.606.000,00	33.096.174.000,00		DPU
22	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2.030.276.820	-	-	DAU + DAK	DPU
<b>JUMLAH</b>		<b>49.401.684.750</b>	<b>6.993.611.800</b>	<b>40.046.174.000</b>		

Sumber: SKPD Kota Pasuruan, diolah

#### 4.9 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang

Kualitas manusia juga dipengaruhi oleh kemampuannya mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan pokok yang dihadapi



*Tahun 2012*

adalah tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatans sumber daya alam, sehingga melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam, sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penengakan hukum.

Kondisi sedemikian ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global akan mempengaruhi kondisi lingkungan, sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan, khususnya terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman dan tata ruang.

Kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya akan membawa kerugian sosial ekonomi yang sangat besar bagi penduduk yang bermukim di wilayah itu khususnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan.

Sasaran utama pembangunan lingkungan hidup adalah meningkatnya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam bagi modal pertumbuhan ekonomi dan penopang sistem kehidupan secara luas.

Tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya perlu mendapat perhatian serius. Alih fungsi yang terjadi kerap mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Seringkali antisipasi dalam perencanaan tata ruang lebih lambat dari pada perkembangan kondisi yang terjadi begitu cepat sehingga respon yang diberikan terkesan terlambat.

*Tahun 2012*

Perkembangan alih fungsi lahan produktif untuk kegiatan investasi industri, jasa maupun permukiman yang tidak sejalan dengan pola perencanaan yang telah ditetapkan akan menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan, yang juga berarti akan terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Alih fungsi lahan di Kota Pasuruan terutama terjadi pada berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya serta mendorong berkurangnya kawasan resapan air, perambahan daerah/kawasan hilir sungai. Fakta ini menjadi indikasi rentannya kondisi lahan Kota Pasuruan terhadap degradasi lingkungan.

Pembangunan kawasan pemukiman baru yang tidak memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), berpotensi menimbulkan gangguan bagi kelestarian lingkungan hidup. Sistem drainase yang buruk akan meningkatkan ancaman terjadinya banjir ketika musim hujan tiba, terlebih lagi sebagian besar wilayah Kota Pasuruan merupakan dataran rendah. Proporsi yang tidak seimbang antara penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau dengan kawasan permukiman merupakan ancaman bagi kapasitas resapan air, sehingga akan menurunkan kadar air tanah.

Hal-hal tersebut di atas antara lain terjadi karena belum berfungsinya aspek pengendalian dalam penyelenggaraan penataan ruang. Melalui perubahan regulasi dalam bidang penataan ruang, yaitu dengan diberlakukannya UU nomor 26 tahun 2007, diharapkan dapat memberikan acuan yang lebih tegas dengan penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelaku penyimpangan tata ruang. Pada undang-undang tersebut Pemerintah Kota antara lain memiliki kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan ruang serta pengembangan kawasan strategis

Sasaran utama penataan ruang adalah meningkatnya tertib pemanfaatan ruang melalui penyusunan dan penetapan peraturan zonasi, kebijakan insentif-disinsentif, pemberian ijin pemanfaatan ruang serta penyelesaian masalah tata ruang.

## Tahun 2012

Secara menyeluruh, tabel 4.9. memberikan rincian program dan pagu belanja indikatif yang ditujukan untuk mencapai prioritas meningkatkan kualitas dan fungsi infrastruktur; serta meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang.

**Tabel 4.9. Program dan Pagu Indikatif Pencapaian Prioritas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Tahun 2012**

NO.	URUSAN/ SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.002.224.600	-	-	DAU+ DAK	BLH
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	621.019.775	-	-		BLH
3	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	39.125.000	-	-		BLH
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	121.449.100	-	-		BLH
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	82.403.000	-	-		BLH
6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	372.299.800	-	-		BLH
7	Program Penataan Tata Ruang	1.047.069.800	100.000.000,00	900.000.000,00		DPU
<b>JUMLAH</b>		<b>3.285.591.075</b>	<b>100.000.000</b>	<b>900.000.000</b>		

Sumber: SKPD Kota Pasuruan, diolah

#### 4.10 Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Penerapan konsep *good governance* menuntut adanya perubahan mendasar dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan secara struktural, fungsional maupun kultural. Perubahan paradigma dari government (pemerintah) ke governance (tata kelola pemerintahan) menuntut perubahan *mind-set* (pola pikir) dan orientasi birokrasi yang semula melayani kepentingan kekuasaan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan *good governance*. Sebab, pertama, pelayanan publik menjadi ranah interaksi antara negara yang diwakili pemerintah dengan lembaga non

*Tahun 2012*

pemerintah. Kedua, berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara lebih mudah pada ranah pelayanan publik, sekaligus dapat dinilai kinerjanya.

Pada tahun 2009, Pemerintah Kota melakukan langkah besar melalui penataan struktur organisasi lembaga daerah, sesuai PP No. 41 tahun 2007, sebagai upaya perwujudan reformasi birokrasi dalam struktur organisasi pemerintahan Kota Pasuruan. Meski reformasi birokrasi terus bergulir, namun hasilnya masih belum mampu memenuhi harapan masyarakat, tetapi perubahan ke arah perbaikan sudah tampak.

Demikian pula, dari sisi internal birokrasi itu sendiri; masih banyak berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain: pelanggaran disiplin, rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur, sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja PNS.

Sasaran yang hendak dicapai reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur birokrasi pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
3. Meningkatnya kesejahteraan pegawai melalui pelaksanaan program remunerasi, dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;
4. Meningkatnya efektifitas pengawasan aparatur pemerintahan melalui koordinasi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;

*Tahun 2012*

6. Tersedianya mekanisme dan terselenggaranya bantuan serta pelayanan hukum bagi pejabat dan pegawai Pemerintah Kota Pasuruan;
7. Meningkatnya informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan dan akses pemanfaatannya;
8. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Meningkatnya kinerja penataan kearsipan dengan mengacu kepada standar penyelamatan dokumen, yang ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia dan prasarana yang memadai;
10. Terwujudnya penataan administrasi kependudukan dalam upaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan tertib administrasi penduduk;
11. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
12. Terwujudnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan; serta
13. Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumber daya alam.

Saat ini tuntutan terhadap pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan suatu keharusan. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan pelayanan prima, Pemerintah Kota mulai mencanangkan penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemberi layanan langsung kepada masyarakat.

Meski demikian, masih dijumpai berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan layanan publik. Kelemahan itu dapat diketahui melalui pengaduan dan keluhan langsung maupun melalui media masa, antara lain menyangkut: prosedur layanan yang berbelit-belit, tidak transparan,

## Tahun 2012

kurang informatif, kurang akomodatif, dan tidak konsisten. Sehingga menimbulkan ketidakpastian waktu dan biaya atas layanan.

Oleh karena itu pada tahun 2012 Pemerintah Kota mencanangkan pencapaian sasaran peningkatan pelayanan publik sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan; serta
2. Meningkatnya transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

Secara menyeluruh, tabel 4.10. memberikan rincian program dan pagu belanja indikatif yang ditujukan untuk mencapai prioritas meningkatkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik.

**Tabel 4.10. Program dan Pagu Indikatif Pencapaian Prioritas Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik Tahun 2012**

NO.	URUSAN/ SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	1.900.000.000	-	-		Bappeda
2	Program Kerjasama Pembangunan	60.000.000	-	-		Bappeda
3	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	128.000.000	-	-		Bappeda
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.017.049.250	-	-		Bappeda
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	0	-	-		Bappeda
6	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	220.700.000	-	-		Bappeda
7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	65.000.000	-	-		Bappeda
8	Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	78.000.000	-	-		Bappeda
9	Program Penyediaan Data Pembangunan	196.000.000	-	-		Bappeda
10	Program Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	416.000.000	-	-		Bappeda
11	Program Penyediaan Data Statistik Pembangunan	380.525.000	-	-		Bappeda

Tahun 2012

NO.	URUSAN/ SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
12	Program Penataan Tata Ruang	340.454.700	-	-		Bappeda
13	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah	187.000.000	0	-		bag. Pemerintahan
14	Program Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	67.950.000	-	-		bag. Pemerintahan
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.905.129.625	-	-		Dispenduk
16	Program Peningkatan kualitas kependudukan	84.424.000	-	-		Dispenduk
17	Program Disiplin Aparatur	4.549.497.500	-	-		Bag. Umum
18	Program Penataan Administrasi Kependudukan	30.000.000	-	-		Bag. Pemerintahan
19	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah	338.500.000	-	-		Bag. Humas
20	Program Pemanfaatan Tehnologi Informasi	360.000.000	-	-		Bag. PDE
21	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	337.887.350	-	-		Bag. Kerjasama
22	Program Penataan Peraturan Perundang - undangan	686.000.000	-	-		Bag. Hukum
23	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	402.825.000	-	-		Bag. Humas
24	Program Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi, Informasi dan Pemanfaatan TI.	235.000.000	-	-		Bag. PDE
25	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	357.070.000	-	-		Bag. Humas
26	Program Peningkatan Informasi dan Komunikasi	247.500.000	-	-		Bag. Humas
27	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	760.349.450	-	-		Bag. Organisasi
28	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	68.000.000	-	-		Bag. Perekonomian
29	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan	1.336.900.000	-	-		Bag. Pembangunan
30	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.255.071.125	-	-		Bag. Kesra
31	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kemasyarakatan	889.800.000	-	-		Bag. Kesra
32	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Sumber Daya	1.000.000.000	-	-		Bag. Perekonomian

Tahun 2012

NO.	URUSAN/ SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
	Alam					
33	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi	643.534.400	-	-		Bag. Perekonomian
34	Program Monitoring dan Evaluasi	115.000.000	-	-		Bag. Perekonomian
35	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai	94.000.000	-	-		Bag. Perekonomian
36	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	71.700.000	-	-		Bag. Perekonomian
37	Program Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	441.000.000	-	-		Bag. Hukum
38	Program Peningkatan Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah	375.753.850	-	-		Bag. Organisasi
39	Program Koordinasi dan Sinkronisasi dalam bidang Pengawasan dan Otonomi Daerah	109.980.000	-	-		Bag. Pemerintahan
40	Program Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dalam bidang Pengawasan dan Otonomi Daerah	9.000.000	-	-		Bag. Pemerintahan
41	Program Evaluasi Kebijakan Pembangunan dalam bidang Administrasi Pemerintahan Umum	18.000.000	-	-		Bag. Pemerintahan
42	Program Sosialisasi Kebijakan dalam bidang Administrasi Pemerintahan Umum	32.000.000	-	-		Bag. Pemerintahan
43	Program Koordinasi dan Sinkronisasi dalam bidang Trantib dan Linmas	204.000.000	-	-		Bag. Pemerintahan
44	Program Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dalam bidang Trantib dan Linmas	15.000.000	-	-		Bag. Pemerintahan
45	Program Fasilitas Penunjang Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	222.060.000	-	-		Bag. Umum
46	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	184.365.250	-	-		Bag. Umum
47	Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	221.000.000	-	-		Bag. Hukum
48	Program Pendampingan dan Penyelesaian Sengketa Hukum	90.000.000	-	-		Bag. Hukum
49	Program Perlindungan Hak Asasi Manusia	50.000.000	-	-		Bag. Hukum
50	Program Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Bidang Trantibmas	15.000.000	-	-		Bag. Pemerintahan



Tahun 2012

NO.	URUSAN/ SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
51	Program Peningkatan Kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	15.000.000	-	-		Bag. Pemerintahan
52	Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	43.000.000	-	-		
53	Program Fasilitas Pengelolaan Data dan Informasi	25.000.000	-	-		Bag. PDE
54	Program Pembangunan Fasilitas E-Government	241.499.500	-	-		Bag. PDE
55	Program Peningkatan Akses Layanan Informasi	294.465.000	-	-		Bag. PDE
56	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	5.310.876.000	-	-		Sekret DPRD
57	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0	-	-		Sekret DPRD
58	Program Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan	4.403.263.340	-	-		BPKA
59	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	942.302.550	-	-		BPKA
60	Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan.	0	-	-		BPKA
61	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	572.510.900	-	-		Inspektorat
62	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	241.161.750	-	-		Inspektorat
63	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.068.658.175	-	-		BKD
64	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.729.773.890	-	-		BKD
65	Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1.355.588.000	-	-		Kec. Bugul Kidul
66	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	192.500.000	-	-		Kec. Bugul Kidul
67	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	50.000.000	-	-		Kec. Bugul Kidul
68	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	39.000.000	-	-		Kec. Bugul Kidul
69	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	24.900.000	-	-		Kec. Bugul Kidul
70	Pengembangan Model Kelembagaan Sosial	65.000.000	-	-		Kec. Bugul Kidul
71	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	38.860.000	-	-		Kec. Purworejo
72	Program Peningkatan	1.009.505.000	-	-		Kec. Purworejo

Tahun 2012

NO.	URUSAN/ SKPD/ PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan Otonomi Daerah					
73	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	213.841.465	-	-		Kec. Purworejo
74	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	50.000.000	-	-		Kec. Purworejo
75	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	46.923.000	-	-		Kec. Purworejo
76	Program Pengembangan Model kelembagaan Sosial	52.700.000	-	-		Kec. Purworejo
77	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	11.513.000	-	-		Kec. Gadingrejo
78	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1.481.857.000	-	-		Kec. Gadingrejo
79	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	172.882.500	-	-		Kec. Gadingrejo
80	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	60.620.000	-	-		Kec. Gadingrejo
81	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	41.927.500	-	-		Kec. Gadingrejo
82	Program Pengembangan Model kelembagaan Sosial	62.371.000	-	-		Kec. Gadingrejo
83	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	103.201.320	-	-		K. Arsip
84	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah	51.159.020	-	-		K. Arsip
85	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana	26.975.000	-	-		K. Arsip
86	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	289.745.040	-	-		K. Arsip
87	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.492.790.440	-	-		K. Arsip
88	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana	15.170.000	-	-		K. Arsip
89	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	190.000.000	-	-		Dishubkominfo
90	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	20.000.000	-	-		Dishubkominfo
91	Program kerjasama informasi dengan media massa	25.000.000	-	-		Dishubkominfo
<b>JUMLAH</b>		<b>45.883.566.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Sumber: SKPD Kota Pasuruan, diolah

#### 4.11 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban, Serta Harmoni Sosial

*Tahun 2012*

Harmonisasi sosial adalah prasyarat dasar yang dibutuhkan untuk merekatkan kehidupan bermasyarakat, yang mungkin tersekat oleh batas-batas rasa kesukuan, agama maupun ras. Karakter religius masyarakat Kota Pasuruan yang berpadu dengan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*), dan mewujud dalam berbagai amal atau tindakan kebajikan terhadap sesama, memiliki potensi untuk melahirkan modal sosial (*social capital*).

Modal sosial merupakan salah satu faktor penentu bagi terciptanya harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya untuk memupuk modal sosial dalam kehidupan masyarakat Kota Pasuruan, akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pembangunan kehidupan beragama. Mengingat, gerak kehidupan masyarakat Kota Pasuruan kental aroma religiusitas. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kehidupan umat beragama adalah meningkatnya kerjasama intra dan antar umat beragama di bidang sosial ekonomi.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi kelancaran pembangunan Kota Pasuruan. Keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat mutlak kenyamanan hidup penduduk, sekaligus landasan utama bagi pembangunan ekonomi. Kondusifitas kehidupan politik yang terbangun di tengah kuatnya rasa kesatuan kebangsaan diantara masyarakat, merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.

Karakter masyarakat Kota Pasuruan yang religius dan penuh tenggang rasa, merupakan modal dasar untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Permasalahan utama dalam mewujudkan rasa aman diantaranya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kemananan dan ketertiban lingkungannya secara mandiri; yang sekaligus juga berfungsi sebagai pemonitor dini apabila terdapat gejala-gejala yang mengancam keamanan dan ketertiban lingkungan.

Guna mewujudkan kemananan dan ketertiban lingkungan masyarakat, maka dirumuskan sasaran-sasaran sebagai berikut:

*Tahun 2012*

1. Meningkatnya pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
2. Meningkatnya kapasitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat; serta
3. Meningkatnya kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan mengantisipasi bahaya bencana.

Kehidupan politik di Kota Pasuruan relatif kondusif, hal ini bisa diindikasikan dari cukup tingginya angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) 2011 – 2015, yang mencapai angka lebih dari 50%. Oleh karena itu, permasalahan utamanya adalah bagaimana menyatukan kembali kehidupan masyarakat, setelah tersekat oleh garis kepartaian pasca pelaksanaan pemilukada.

Salah satu komponen penting untuk merekatkan kembali kehidupan masyarakat yang tersekat adalah melalui penguatan rasa kebangsaan. Oleh karena itu Pemerintah Kota terus membangun dan memperkuat rasa kesatuan bangsa dalam kehidupan masyarakat Kota Pasuruan. Rasa kebangsaan juga mampu mengeliminasi karekater inklusif yang diakibatkan oleh perasaan kesukuan, keagamaan dan ras.

Guna mewujudkan kehidupan politik yang kondusif dan ditunjang dengan kuatnya rasa kesatuan bangsa, maka dirumuskan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kehidupan bangsa dan masyarakat bagi terselenggaranya proses politik secara demokratis;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik; serta
3. Meningkatnya wawasan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

## Tahun 2012

Secara menyeluruh, tabel 4.11. memberikan rincian program dan pagu belanja indikatif yang ditujukan untuk mencapai prioritas meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat serta harmoni sosial.

**Tabel 4.11. Program dan Pagu Indikatif Pencapaian Prioritas Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban, Serta Harmoni Sosial Tahun 2012**

NO.	URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program pengembangan Wawasan Kebangsaan	150.000.000	-	-		Bakesbang
2	Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik	99.885.000	-	-		Bakesbang
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Menjaga Ketertiban Keamanan	210.212.000	-	-		Bakesbang
4	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	90.000.000	-	-		Bakesbang
5	Program Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Menghindari Disintegrasi Bangsa	85.425.000	-	-		Bakesbang
6	Program Peningkatan Pemeliharaan Stabilitas Ketahanan Bangsa dan Sosial Kemasyarakatan	160.870.000	-	-		Bakesbang
7	Program Penanaman Nilai-Nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (RANHAM)	9.542.700	-	-		Bakesbang
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	300.000.000	-	-		Bakesbang
9	Program Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	298.000.000	-	-		Bakesbang
10	Program Ketahanan Bangsa Terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan Instabilitas Daerah	179.686.000	-	-		Bakesbang
11	Program Pembinaan Stabilitas Politik Daerah	59.735.000	-	-		Bakesbang
12	Peningkatan Pemeliharaan Stabilitas Ketahanan Bangsa dan Sosial masyarakat	399.295.000	-	-		Bakesbang
13	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	219.478.000	-	-		Satpol PP
14	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	450.950.700	-	-		Satpol PP
15	Program Pengendalian dan Penegakan Peraturan Daerah	181.135.000	-	-		Satpol PP

Tahun 2012

NO.	URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
16	Program Pembinaan Kesiagaan, Pencegahan Dini dan Pengurangan Resiko Akibat Bencana	330.000.000	-	-		BPBD
17	Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kedaruratan dan Penyediaan logistik Penanggulangan Bencana	660.000.000	-	-		BPBD
18	Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana	230.000.000	-	-		BPBD
19	Program Pencegahan Dini dan Posko Kesiagaan Bencana	183.925.000	-	-		BPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>4.298.139.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Sumber: SKPD Kota Pasuruan, diolah

#### 4.12 Peningkatan Kearifan Lokal dan Kesalehan Sosial

Derasnya arus globalisasi telah mengikis nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kota Pasuruan. Pembangunan di bidang kebudayaan, diarahkan untuk mempertahankan eksistensi nilai-nilai kearifan lokal yang semakin ter-*marginal*-kan. Kota Pasuruan yang dikenal dengan julukan "Kota Santri" menimbulkan komitmen untuk senantiasa mengajarkan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, melalui pembangunan bidang keagamaan inilah akan timbul peningkatan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Pasuruan, dalam bingkai kesalehan sosial.

Oleh karena itu pada tahun 2012 Pemerintah Kota mencanangkan pencapaian sasaran peningkatan kearifan lokal dan kesalehan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan masyarakat Kota Pasuruan;
2. Terpeliharanya dan meningkatnya pelestarian kebudayaan yang ada;
3. Terpeliharanya dan meningkatnya pengelolaan keragaman budaya yang ada;

Tahun 2012

4. Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat.

Secara menyeluruh, tabel 4.13. memberikan program dan pagu belanja indikatif yang ditujukan untuk mencapai prioritas peningkatan kearifan lokal dan kesalehan sosial.

**Tabel 4.12. Program dan Pagu Indikatif Pencapaian Prioritas Peningkatan Kearifan Lokal dan Kesalehan Sosial Tahun 2012**

NO.	URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN			Ket.	SKPD
		APBD	APBD PROV. JAWA TIMUR	APBN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan	113.115.000	-	-		Diknas
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	285.000.000	-	-		Dispora
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	565.000.000	-	-		Dispora
4	Program : Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	2.103.500.000	-	-	DAU + DAK	Dispora
<b>JUMLAH</b>		<b>3.066.615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Sumber: SKPD Kota Pasuruan, diolah

#### **4.13 Rencana Kinerja Indikator Makro Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah**

Secara ringkas, Tabel 4.13. menjelaskan nilai alokasi belanja pembangunan yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian 12 prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2012. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan belanja pembangunan di sini mencakup belanja yang dibiayai

*Tahun 2012*

dari APBD kota, APBD propinsi dan APBN. Adapun komponen belanja pembangunan yang berasal dari APBD Kota meliputi belanja langsung non rutin (program 15 ke atas) dan belanja tidak langsung non gaji pegawai (belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dana bagi hasil dan belanja tidak terduga).



**Tabel 4.13.Rekapitulasi Nilai Alokasi Anggaran Belanja  
Per Prioritas dan Sub Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2012**

NO	AGENDA/SUB AGENDA	SUMBER PENDANAAN					TOTAL	PROP
		APBD KOTA			APBD PROPINSI	APBN		
		Belanja Pembangunan						
		DAU	DAK	Lain-Lain Pendapatan (Cukai & T. Drt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan</b>	<b>36.580.524.490</b>	<b>9.212.914.520</b>	-	<b>1.240.000.000</b>	<b>14.499.768.404</b>	<b>61.533.207.414</b>	<b>10,58%</b>
	Pendidikan	36.580.524.490	9.212.914.520	-	1.240.000.000	14.499.768.404	61.533.207.414	10,58%
2	<b>Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan</b>	<b>27.997.253.776</b>	<b>4.234.082.820</b>	<b>619.845.600</b>	-	<b>917.565.000</b>	<b>33.768.747.196</b>	<b>5,81%</b>
	Kesehatan	27.997.253.776	4.234.082.820	619.845.600	-	917.565.000	33.768.747.196	5,81%
3	<b>Perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan</b>	<b>2.105.894.500</b>	-	-	-	-	<b>2.105.894.500</b>	<b>0,36%</b>
	a. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	425.613.000	-	-	-	-	425.613.000	0,07%
	b. Urusan Wajib Tenaga Kerja	1.680.281.500	-	-	-	-	1.680.281.500	0,29%
4	<b>Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat</b>	<b>19.350.962.060</b>	-	-	-	-	<b>19.350.962.060</b>	<b>3,33%</b>
	a. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	11.539.144.850	-	-	-	-	11.539.144.850	1,98%
	b. Urusan Ketahanan Pangan	668.665.700	-	-	-	-	668.665.700	0,11%
	c. Pemberdayaan Masyarakat	6.738.718.010	-	-	-	-	6.738.718.010	1,16%
	d. Transmigrasi	404.433.500	-	-	-	-	404.433.500	0,07%
5	<b>Peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak</b>	<b>535.796.000</b>	-	-	-	-	<b>535.796.000</b>	<b>0,09%</b>
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	535.796.000	-	-	-	-	535.796.000	0,09%

Review RKPD Kota Pasuruan Tahun 2012

NO	AGENDA/SUB AGENDA	SUMBER PENDANAAN					TOTAL	PROP
		APBD KOTA			APBD PROPINSI	APBN		
		Belanja Pembangunan						
		DAU	DAK	Lain-Lain Pendapatan (Cukai & T. Drt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	<b>Peningkatan peran pemuda dan keolahragaan</b>	5.726.957.500	-	-	-	-	5.726.957.500	0,98%
	Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	5.726.957.500	-	-	-	-	5.726.957.500	0,98%
7	<b>Pemberdayaan usaha mikro, kecil &amp; menengah serta peningkatan iklim investasi usaha</b>	12.517.506.810	1.218.000.000	424.227.000	-	-	14.159.733.810	2,44%
	a. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Industri dan Perdagangan dan Energi	1.381.384.750	-	-	-	-	1.381.384.750	0,24%
	b. Urusan Wajib Penanaman Modal	2.227.196.560	-	-	-	-	2.227.196.560	0,38%
	c. Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1.674.469.000	-	-	-	-	1.674.469.000	0,29%
	d. Urusan Kehutanan	131.247.000					131.247.000	0,02%
	e. Pariwisata	661.025.000					661.025.000	0,11%
	f. Kelautan dan Perikanan	371.750.000	1.218.000.000	-	-	-	1.589.750.000	0,27%
	g. Perdagangan	4.340.287.000	-	68.390.000	-	-	4.408.677.000	0,76%
	h. Perindustrian	1.730.147.500	-	355.837.000	-	-	2.085.984.500	0,36%
8	<b>Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur</b>	26.817.127.750	22.515.198.900	-	6.993.611.800	40.046.174.000	96.372.112.450	16,57%
	a. Urusan Pekerjaan Umum	15.890.635.450	22.515.198.900	-	6.673.351.800	37.596.174.000	82.675.360.150	14,22%
	b. Perhubungan	3.906.091.500	-	-	0	0	3.906.091.500	0,67%
	c. Lingkungan Hidup	7.020.400.800	-	-	320.260.000	2.450.000.000	9.790.660.800	1,68%
9	<b>Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang</b>	3.019.691.075	265.900.000	-	100.000.000	900.000.000	4.285.591.075	0,74%

Review RKPD Kota Pasuruan Tahun 2012

NO	AGENDA/SUB AGENDA	SUMBER PENDANAAN					TOTAL	PROP
		APBD KOTA			APBD PROPINSI	APBN		
		Belanja Pembangunan						
		DAU	DAK	Lain-Lain Pendapatan (Cukai & T. Drt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a. Penataan Ruang	1.047.069.800	-	-	100.000.000	900.000.000	2.047.069.800	0,35%
	b. Lingkungan Hidup	1.972.621.275	265.900.000	-	-	-	2.238.521.275	0,38%
<b>10</b>	<b>Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik</b>	<b>45.638.016.890</b>	-	-	-	-	<b>45.638.016.890</b>	<b>7,85%</b>
	a. Perencanaan Pembangunan dan Statistik	4.801.728.950	-	-	-	-	4.801.728.950	0,83%
	b. Pertanahan	54.950.000	-	-	-	-	254.950.000	0,04%
	c. Kependudukan dan Catatan Sipil	1.989.553.625	-	-	-	-	1.989.553.625	0,34%
	d. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan	36.377.743.495	-	-	-	-	36.377.743.495	6,26%
	e. Perpustakaan dan Kearsipan	1.979.040.820	-	-	-	-	1.979.040.820	0,34%
	f. Komunikasi dan Informatika	235.000.000	-	-	-	-	235.000.000	0,04%
<b>11</b>	<b>Peningkatan ketenteraman dan ketertiban, serta harmoni sosial</b>	<b>4.298.139.400</b>	-	-	-	-	<b>4.298.139.400</b>	<b>0,74%</b>
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4.298.139.400	-	-	-	-	4.298.139.400	0,74%
<b>12</b>	<b>Peningkatan kearifan lokal dan kesalehan sosial</b>	<b>2.159.500.000</b>	<b>794.000.000</b>	-	-	-	<b>2.953.500.000</b>	<b>0,51%</b>
	Kebudayaan	2.159.500.000	794.000.000	-	-	-	2.953.500.000	0,51%
<b>TOTAL</b>		<b>373.494.740.502</b>	<b>76.480.192.480</b>	<b>2.088.145.200</b>	<b>16.667.223.600</b>	<b>112.727.014.808</b>	<b>581.457.316.590</b>	<b>100%</b>

Sumber: SKPD Kota Pasuruan, diolah

## Tahun 2012

Penetapan sasaran untuk masing-masing prioritas berfungsi sebagai komponen evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh prioritas yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan. Oleh karena itu dalam penetapan sasaran sedapat mungkin diupayakan terukur, atau dengan kata lain sasaran perlu diterjemahkan ke dalam indikator-indikator yang disertai dengan target terukur yang akan dicapai. Tabel 4.14 berikut ini menguraikan indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2012.

Penetapan indikator ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian prioritas pembangunan Kota Pasuruan 2012, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator kinerja dimaksud hanya mencakup indikator makro pada urusan pemerintahan strategis, yang diharapkan mampu menjadi representasi dari keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pembangunan Kota Pasuruan tahun 2012.

**Tabel 4.14. Rencana Kinerja Indikator Makro Pencapaian Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2012**

No	Prioritas/Sub Prioritas Pembangunan	Satuan	Target
<b>A</b>	<b>Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan</b>		
1	Angka Buta Huruf	(%)	3,84
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,84
3	Angka partisipasi kasar		
	a. PAUD	(%)	81,77
	b. SD/MI	(%)	126,18
	c. SLTP/MTs	(%)	98,01
	d. SLTA/MA	(%)	98,2
4	Angka Partisipasi Murni		
	a. PAUD	(%)	73,87
	b. SD/MI	(%)	113,01
	c. SLTP/MTs	(%)	68,88
	d. SLTA/MA	(%)	62,85
5	Indeks Pendidikan	Point	84,92
	a. Pendidikan dasar		
	- Angka partisipasi sekolah	%	113,91

## Tahun 2012

No	Prioritas/Sub Prioritas Pembangunan	Satuan	Target
	- Rasio ketersediaan sekolah	/PUS	258
	- Rasio murid/guru	%	16
	b. Pendidikan menengah		
	- Angka partisipasi sekolah	%	68,88
	- Rasio ketersediaan sekolah	/PUS	357
	- Rasio murid/guru	%	14
	c. Pendidikan atas		
	- Angka partisipasi sekolah	%	62,45
	- Rasio ketersediaan sekolah	/PUS	493
	- Rasio murid/guru	%	13
<b>B</b>	<b>Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan</b>		
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,6
2.	Angka kematian bayi	Sat. Bayi	6,04
3.	Angka kematian ibu melh	Sat. Ibu	0,83
4.	Prosentase KEP pada balita	(%)	12,28
5.	Rasio posyandu	Per Sat.	14,17
6.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu	Per Sat.	9,11
7.	Rasio rumah sakit	Per Sat.	0,06
8.	Rasio dokter umum	Per Sat.	28
9.	Rasio tenaga kesehatan	Per Sat.	8
<b>C</b>	<b>Perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan</b>		
1	Rasio penduduk miskin	%	7,95
2	Rasio penduduk yang bekerja	%	90,01
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	(%)	65,97
<b>D</b>	<b>Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat</b>		
1	Rasio akseptor KB	(%)	79,24
2	Kelompok binaan LPM/kelurahan	KSM	30
3	Kelompok binaan BKM/kelurahan	KSM	30
4	Kelompok binaan LKM/kelurahan	KSM	30
5	PKK aktif	Unit	90
6	Kelompok binaan PKK	Unit	70
<b>E</b>	<b>Peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak</b>		
1	Proporsi perempuan di lemb. eksekutif	(%)	49,12
2	Proporsi perempuan di lemb. legislatif	(%)	4
3	Indeks Pembangunan Gender	Point	63,9
<b>F</b>	<b>Peningkatan peran pemuda dan olahraga</b>		
3	Jumlah Klub Olahraga	Unit	58
4	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	1
1	Jumlah Organisasi Pemuda	Unit	20
2	Jumlah Karang Taruna	Unit	34

## Tahun 2012

No	Prioritas/Sub Prioritas Pembangunan	Satuan	Target
3	Jumlah Atlit Berprestasi Nasional	Orang	18
4	Jumlah Peralatan Olahraga	Buah	25
5	Jumlah Event Olahraga	Kali	6
<b>G</b>	<b>Pemberdayaan usaha mikro, kecil &amp; menengah serta peningkatan iklim investasi usaha</b>		
1	Jumlah koperasi	Unit	319
2	Jumlah modal koperasi	Jt Rp	40.428
2	Jumlah BPR/LKM	Unit	57
1	Nilai kredit investasi	Milyar Rp	142,11
<b>H</b>	<b>Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur</b>		
1	Proporsi jalan dalam kondisi baik	%	93,5
2	Rasio rumah tinggal bersanitasi	%	71,07
3	Rasio kawasan kumuh	/luas wlyh	4,29
4	Proporsi jembatan dlm kond. baik	%	89,56
5	Kondisi drainase kondisi lancar	%	90,78
6	Lama genangan akibat banjir	Jam	2,5
7	Jalan lingkungan kondisi baik	/ttl jalan	83,04
1	Jumlah arus penumpang KA	000 Org	848.465
2	Ratio ijin Trayek	(%)	8,79
3	Jumlah Uji Kir Angkutan	Unit	2
4	Jumlah terminal bis	Unit	2
<b>I</b>	<b>Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang</b>		
1	Proporsi penanganan sampah	%	81,43
2	Proporsi ruang terbuka hijau	%	20,98
3	Skor penilaian adipura	Poin	73,01
<b>J</b>	<b>Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik</b>		
1.	Kesesuaian tata ruang dgn RTRW	Kategori	Cukup
2.	Kualitas fasilitas publik	Kategori	Cukup
3.	Review RTRW	Kategori	Cukup
4.	Ketaatan terhadap RTRW	Kategori	Cukup
5.	Rasio penduduk ber KTP	Per Sat.	91
6.	Rasio bayi berakte kelahiran	Per Sat.	35,82
7.	Rasio pasangan berakte nikah	Per Sat.	100
8.	Surat kabar yg menjalin kerjasama	Unit	6
9.	Radio/TV lokal yg bekerjasama	Unit	3
10.	Lembaga pers yang terdaftar di PWI	Unit	30
11.	Situs SKPD di bawah domain Pemkot	Unit	3
<b>K</b>	<b>Peningkatan ketenteraman dan ketertiban, serta harmoni sosial</b>		
1	Rasio Pol PP	Per. Sat	6

*Tahun 2012*

No	Prioritas/Sub Prioritas Pembangunan	Satuan	Target
2	Rasio petugas linmas	Per. Sat	30
3	Rasio Pos kamling	Per. Sat	25
<b>L</b>	<b>Peningkatan kearifan lokal dan kesalehan sosial</b>		
1	Jumlah Grup Kesenian	Unit	10
2	Jumlah Sanggar Budaya / Seni	Unit	7

*Sumber: Bappeda Kota Pasuruan*

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta memperhatikan kondisi kekuatan, kelemahan, potensi dan ancaman bagi pengembangan Kota Pasuruan ke depan, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kota Pasuruan diselenggarakan 20 urusan wajib dan 7 urusan pilihan.

Penyelenggaraan 27 urusan wajib dan pilihan tersebut akan diikuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah input timbal-balik dari rencana strategis (renstra) SKPD yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing SKPD dan ditunjang dengan hasil musyawarah rencana pembangunan daerah (musrenbangda), dimana secara vertikal menghubungkan proses perencanaan "*bottom-up*" dan "*top-down*". Sepenuhnya disadari bahwa pencapaian kinerja program/kegiatan bukanlah semata-mata dihasilkan dari kinerja SKPD pelaksanaannya semata, namun lebih sebagai hasil dari sinergitas pencapaian kinerja program/kegiatan lainnya yang saling menunjang.

Melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), telah teridentifikasi berbagai usulan kegiatan tahun 2012 yang telah dipilah dan dipilih dalam rangka menjawab permasalahan dan pencapaian target pembangunan. Hasil analisis yang telah dilakukan menghasilkan rencana kegiatan pembangunan tahun 2012, dan diketahui usulan pembiayaan keseluruhan program/kegiatan Kota Pasuruan pada tahun 2012 adalah Rp.581.457.316.590,00.

Patut disadari bahwa program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Review RKPD ini, bukanlah domain tunggal yang menentukan



## *Review RKPD Kota Pasuruan Tahun 2012*

keberhasilan pembangunan di Kota Pasuruan; namun hanya bersifat stimulan yang membutuhkan apresiasi dalam bentuk partisipasi aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu sinergitas seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Pasuruan diperlukan demi tercapainya kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kota Pasuruan tahun 2012.

**BAB VI**

**KAIDAH PELAKSANAAN**

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD maupun antar SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD Kota Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah terprogramkan dapat dicapai melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang mulai tingkat kelurahan, kecamatan, forum SKPD, hingga tingkat kota.

Review RKPD Tahun 2012 dapat dipergunakan sebagai acuan bagi SKPD maupun masyarakat termasuk dunia usaha, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di Kota Pasuruan pada tahun 2012, serta menjadi penyempurnaan RKPD Tahun 2013. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh SKPD di Kota Pasuruan dan pemangku kepentingan pembangunan Kota Pasuruan memiliki kedudukan yang setara dalam partisipasi aktif pelaksanaan program dan kegiatan Review RKPD Tahun 2012.
2. Bagi SKPD Kota Pasuruan, Review RKPD Tahun 2012 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun perubahan kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi pemerintah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2012, sebagai berikut:
  - a. Uraian penggunaan perubahan APBD tahun Anggaran 2012, yang merupakan program dan kegiatan yang dipergunakan untuk

## *Review RKPD Kota Pasuruan Tahun 2012*

mencapai prioritas pembangunan nasional dan daerah, yang berupa kerangka regulasi sesuai kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Keputusan KDH, atau Keputusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- b. Uraian rencana penggunaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan daerah, yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya.
  - c. Uraian sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, baik sebagai wujud dari penyerahan wewenang sesuai prinsip desentralisasi maupun tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
  - d. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 dari masing-masing instansi daerah, baik yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah (desentralisasi) maupun sebagai wujud tugas pembantuan yang diterima pemerintah kota.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
  4. Dalam menyusun Renja, SKPD wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

## *Review RKPD Kota Pasuruan Tahun 2012*

5. Pada akhir tahun anggaran 2012, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan lainnya.
6. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Review RKPD Tahun 2012 berlaku sejak buku ini di terbitkan. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan Review RKPD Tahun 2012 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara pemerintahan serta masyarakat.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu bersungguh-sungguh melaksanakan program dan kegiatan Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2012, agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kota Pasuruan.

Walikota Pasuruan,

H. HASANI